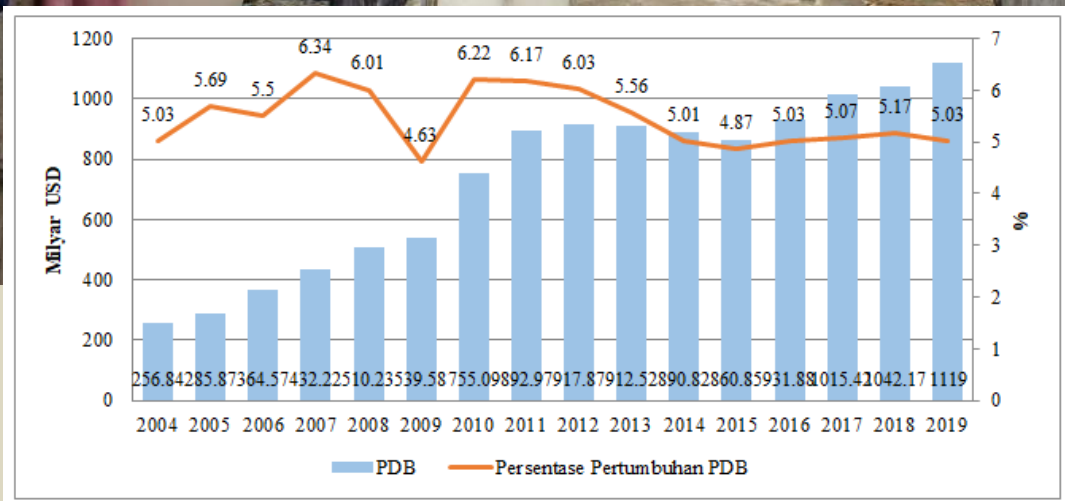


Lia Nazliana Nasution
Ade Novalina
Ardela



PERTUMBUHAN EKONOMI & TINGKAT KEMISKINAN

INDONESIA REVIEW

PRAKATA

Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku Monograf hasil penelitian dengan judul **“Pertumbuhan Ekonomi & Tingkat Kemiskinan, Indonesia Review”** ini dapat selesai tepat pada waktunya, setelah memperoleh berbagai saran, kritik, dan masukan dari kalangan rekan sejawat di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Semoga Monograf ini dapat dibaca dan memberi kebermanfaatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan ilmu pengetahuan mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi pada khususnya.

Ucapan terima kasih dari Penulis dihaturkan sebesar-besarnya kepada Kementerian Riset dan Teknologi – Badan Riset dan Inovasi Nasional (RISTEK-BRIN) yang telah mendanai penelitian hibah dikti dan buku Monograf ini sebagai salah satu luaran penelitian, kepada Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai tempat penulis bekerja, dan kepada rekan-rekan panulis yang telah membantu proses penulisan Monograf sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Kepada pihak lain yang belum disebutkan karena keterbatasan, penulis turut menyampaikan ungkapan terima kasih. Semoga segala budi baik yang ditujukan kepada penulis dapat menjadi berkah bagi kita semua.

Medan, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
Bagian 1 KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA	1
Bagian 2 KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI	12
PENDAHULUAN	12
TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI	18
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI	34
METODE PENGUKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI	40
Bagian 3 KONDISI KEMISKINAN INDONESIA	44
PENDAHULUAN	44
PERHITUNGAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA	48
INDIKATOR UTAMA TINGKAT KEMISKINAN	50
Bagian 4 INKLUSI KEUANGAN PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN	56
Bagian 5 TEORI PERKEMBANGAN KEUANGAN – PERTUMBUHAN EKONOMI	65
Bagian 6 INKLUSI KEUANGAN DAN KEMISKINAN	69
Bagian 7 HASIL STUDI EMPIRIS	71
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107
BIOGRAFI PENULIS	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Efek Tabungan pada Akumulasi Modal	66
Gambar 5.2. Efek Tabungan pada Output	67

Bagian 1

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia telah membuat langkah pembangunan yang luar biasa di abad ke-21, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan yang signifikan. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, sambil menghindari perangkap pendapatan menengah. Namun, kemajuan Indonesia berisiko terbalik karena dampak pandemi penyakit virus corona (COVID-19) pada kehidupan dan mata pencaharian. Langkah-langkah kesehatan masyarakat dan bantuan sosial dan ekonomi yang diperluas termasuk di antara prioritas jangka pendek. Kemudian, sebagai bagian dari pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia harus mengatasi tantangan pembangunan yang telah berlangsung lama, termasuk mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan daya saing, mengelola risiko perubahan iklim dan bencana, serta mencapai kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan PDB Indonesia mencapai angka 5%, namun saat pandemi COVID-19 melanda tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan PDB defisit menjadi -2,1%. Angka

tersebut masih relatif lebih baik, jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN serta negara-negara G20 lainnya. Pada tahap awal kemunculan Covid-19 pada kuartal pertama tahun 2020, masyarakat masih belum bisa memastikan berapa banyak korban jiwa akibat pandemi tersebut. Pada aspek ekonomi, hampir semua orang sepakat bahwa pandemi akan melumpuhkan kegiatan ekonomi; dengan demikian, menyebabkan krisis di seluruh dunia. Terwujud, sepanjang tahun 2020 semakin banyak negara yang mengalami resesi ekonomi termasuk Indonesia.

Meski masih berada di teritori negatif, pertumbuhan PDB Indonesia paling mendekati angka positif sejak wabah. Tercatat sebesar -0,74% (y.o.y), perekonomian Indonesia pada triwulan I 2021 mengalami kontraksi yang tidak terlalu parah di hampir semua sektor dibandingkan tiga triwulan sebelumnya. Selain itu, beberapa sektor yang tumbuh cukup positif di masa pandemi masih mencatatkan ekspansi pada kuartal I tahun 2021. Menyelam lebih dalam ke sektornya, industri manufaktur sebagai sektor terbesar dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari seperlima, mencatat pertumbuhan sebesar -1,38% (yoy) pada Triwulan I tahun 2021, meningkat cukup besar dari -3,13% (yoy) pada triwulan terakhir tahun 2020. Demikian pula perdagangan besar dan eceran sebagai

sektor utama lainnya dalam perekonomian dengan kontribusi sebesar 13% terhadap PDB nasional, tumbuh -1,23% (yoy) di Q1 2021 dari -3,66% (yoy) di Q4 2020. Karena PPKM diberlakukan di sebagian besar Q1 2021, tak heran, semua komponen pengeluaran PDB menyusut, kecuali konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Selain gangguan akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan negatif di sebagian besar komponen belanja karena kita bandingkan dengan Q1 2020 saat pandemi belum sepenuhnya mereda di dalam negeri.

Memasuki tahun 2021, Indonesia sedang menikmati periode keadaan ekonomi yang lebih baik. Meskipun lonjakan kasus Covid-19 di awal tahun 2021, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang lebih ringan setelah mencapai pertumbuhan terendah di Triwulan ke-2 2020. Demikian pula, aktivitas produksi dan konsumsi rumah tangga secara bertahap meningkat karena aktivitas ekonomi mendapatkan momentum ekspansi. Memasuki Q2 2021, aktivitas ekonomi di Indonesia cukup kuat di tengah maraknya kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni lalu. Sebagai indikasi kemajuan pemulihan ekonomi yang signifikan, kinerja kredit meningkat tajam sepanjang April dan Mei 2021 terutama didorong oleh peningkatan kredit modal kerja dan kredit investasi. Pertumbuhan positif kredit konsumsi dan

akselerasi inflasi inti menunjukkan daya beli mulai pulih meskipun konsumen masih enggan berbelanja.

Dilihat dari konsumsi rumah tangga, selama tiga bulan pertama tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,24% (yoy). Hanya konsumsi peralatan yang tumbuh sebesar 1,12% (yoy) pada Q1 2021 dari 0,72% (yoy) pada Q4 2020 dan konsumsi kesehatan dan pendidikan yang mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,31% (yoy) pada triwulan I 2021 dibandingkan 0,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sebaliknya, komponen konsumsi lainnya terkena dampak pandemi. Konsumsi makanan dan minuman, transportasi & komunikasi, serta restoran & hotel yang menyumbang hampir 70% dari total konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,39% (yoy), 4,13% (yoy), dan 4,11 (yoy) pada periode pertama. triwulan 2021.

Selanjutnya komponen investasi mencatat pertumbuhan negatif 0,23% (yoy) pada triwulan I 2021 dibandingkan kontraksi 6,02% (yoy) pada triwulan terakhir. Dengan adanya PPKM Mikro, investasi infrastruktur fisik yang menjadi penyumbang investasi tertinggi diperkirakan akan terus menurun, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan negatif sebesar 0,74% (y.o.y) pada bangunan & struktur. Mungkin untuk memenuhi permintaan internasional,

investasi mesin & peralatan tumbuh sebesar 3,48% (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 6,51% (yoy) pada Triwulan ke-4 2020. Hal ini kemudian berarti pertumbuhan ekspor sebesar 6,74% (yoy) selama tiga bulan pertama tahun 2021.

Setelah mengalami resesi selama empat kuartal berturut-turut, Indonesia diperkirakan akan keluar dari resesi pada Q2 2021. Hal ini antara lain karena efek dasar yang rendah saat Indonesia mencapai titik terendah pada kuartal kedua 2020 ketika krisis Covid-19 terjadi. Faktor penting lain untuk mengantisipasi pertumbuhan positif ini adalah pencairan program pemulihan ekonomi (PEN) yang memiliki total anggaran sebesar Rp699,43 triliun untuk tahun 2021. Selama semester I tahun 2021, realisasi anggaran PEN mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 triliun. % dari total anggaran.

Anggaran kesehatan di bawah PEN telah terealisasi sebesar Rp47,17 triliun atau 24,6% dari total anggaran kesehatan. Untuk perlindungan sosial, anggaran telah terealisasi sebesar Rp66,3 triliun atau 43,2% dari total anggaran. Pencairan anggaran perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), dan kartu prakerja membantu meningkatkan daya beli untuk mendukung pemulihan ekonomi. Anggaran yang tersisa realisasinya terbagi antara UMKM, insentif

usaha, program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta program bantuan keuangan korporasi selama pandemi. Memoderasi kasus Covid-19 antara April dan Juni juga berkontribusi pada pertumbuhan positif yang telah lama ditunggu-tunggu. Selama kuartal kedua tahun 2021, jumlah rata-rata harian 7 hari yang dikonfirmasi kasus baru berkisar antara 5.000 dan 7.500, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tiga bulan pertama tahun 2021. Terakhir, peluncuran vaksinasi juga membantu peningkatan ekonomi.

Pada bulan Juni, Indonesia terus mencatat surplus bulanan dalam perdagangan barang internasional selama 13 bulan berturut-turut sejak Mei tahun lalu. Namun, surplus transaksi berjalan diperkirakan akan tetap berada di wilayah negatif serupa dengan angka Q1 2021 karena surplus perdagangan barang yang lebih sempit dan defisit perdagangan jasa yang terus berlanjut. Berbeda dengan impor tahun lalu yang melemah akibat pandemi, impor barang mentah dan barang modal mulai bangkit. Kenaikan impor tersebut sejalan dengan tanda ekspansi industri untuk mendukung pemulihan ekonomi yang tercermin dari angka PMI di atas 50 sepanjang Mei-Juni 2021.

Sebagai indikasi kemajuan yang signifikan dalam pemulihan ekonomi, kinerja kredit meningkat tajam sepanjang April dan Mei

2021. Rata-rata kredit selama dua bulan tersebut meningkat 35,03% dibandingkan rata-rata kredit sepanjang April dan Juni 2020, menunjukkan aktivitas ekonomi perlahan akan kembali normal. tingkat pra-pandemi. Pertumbuhan dua digit tersebut didorong oleh peningkatan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 56,70% (y.o.y), 31,44% (y.o.y), dan 2,78% (y.o.y). Kredit konsumsi mencerminkan keengganan konsumen untuk berbelanja karena dunia masih penuh ketidakpastian, seperti ditunjukkan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 11,10% (yoy) pada Juni 2021 dan pertumbuhan nilai aset bersih reksa dana sebesar 10,77% (yoy) pada Mei 2021. .

Secara keseluruhan, aktivitas ekonomi pada Q2 2021 relatif kuat karena pelonggaran pembatasan sosial, stimulus pemerintah, serta terjadinya Ramadhan dan Idul Fitri di tengah maraknya kasus Covid-19 belakangan ini. Indonesia memperkirakan bahwa Indonesia akan keluar dari resesi dengan ekonomi tumbuh sekitar 6,4% (yoy) (perkiraan berkisar dari 6,2% hingga 6,7%) pada Q2 2021. Namun, lonjakan tajam dalam kasus positif Covid-19 dan pembatasan sosial yang berkepanjangan sejak akhir bulan Juni diperkirakan akan mundurnya kemajuan pemulihan ekonomi pada sisa triwulan tahun

ini; membuat prediksi pertumbuhan untuk FY2021 sekitar 3,2% hingga 3,9% (y.o.y).

Laju inflasi Juni tercatat sebesar 1,33% (y.o.y), turun signifikan dari 1,67% (y.o.y) pada Mei 2021 seiring dengan meredanya tekanan harga akibat hari libur. Melemahnya inflasi pada periode ini didorong oleh penurunan komponen administered prices dan volatile goods, meskipun inflasi inti mengalami sedikit penguatan. Sebaliknya, deflasi secara bulanan tercatat -0,16% (m.t.m), yang merupakan level terendah sejak 2019. Hal ini dipicu oleh melemahnya ketiga komponen, khususnya komponen harga yang bergejolak, yang mengalami deflasi cukup tinggi. Tak heran jika inflasi volatile food pada Juni turun menjadi 1,60% (yoy) dibandingkan 3,66% (yoy) pada bulan sebelumnya, dan -1,23% (mtm) dari 0,39% (mtm) pada Mei 2021 karena faktor makanan. normalisasi harga setelah perayaan Idul Fitri. Selama lebih dari satu tahun, tingkat inflasi berada di bawah kisaran target BI sebesar $3\% \pm 1$ dan LPEM FEB UI memperkirakan tekanan harga akan tetap moderat di bulan mendatang.

Tidak ada negara yang pernah siap menghadapi pandemi. Pada awal wabah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyampaikan pesan sederhana yang sama: tes, tes, tes. Pengujian besar-besaran yang dikombinasikan dengan *lockdown* telah berhasil

membantu Selandia Baru dan Taiwan membebaskan diri dari Covid-19 lebih awal. Selama *lockdown*, kedua negara melakukan pengujian ekstensif, operasi pelacakan kontrak, dan tindakan isolasi, yang memungkinkan kehidupan sehari-hari kembali normal dengan cepat.

Indonesia tergolong lambat dalam mengendalikan pandemi. Ketika negara-negara tetangga melaporkan lonjakan kasus, Indonesia tidak mengikuti apa yang direkomendasikan WHO: pengujian tidak dilakukan dalam skala besar. Ketika Indonesia secara resmi memiliki kasus pertama yang dikonfirmasi, Pemerintah Indonesia hanya mempromosikan pengujian diagnostik cepat, metode pengujian yang jauh lebih tidak akurat. Hanya pada bulan Juli Pemerintah Indonesia secara resmi menyarankan pemerintah provinsi dan lainnya untuk tidak menggunakan pengujian cepat untuk tujuan diagnostik dalam pedoman pencegahan dan pengendalian Covid19 yang diperbarui. Lockdown juga tidak dilakukan.

Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang keluar masuk daerahnya masing-masing asalkan telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Tanpa tindakan pencegahan dan penanganan yang jelas, Indonesia belum pernah melihat kasus harian Indonesia di bawah 1.000 sejak akhir Maret

2020. Dalam hal persiapan untuk potensi lonjakan kasus, sementara negara lain meningkatkan kapasitas sistem kesehatannya, Indonesia relatif tidak berbuat banyak. Pada tahun 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas) merilis jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang di Indonesia sebesar 1,33, sedikit meningkat dari 1,04 tempat tidur per 1.000 orang pada tahun 2017. Angka ini relatif rendah dibandingkan negara lain, seperti Cina, Jepang, Inggris, dan Turki, di mana jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang dilaporkan masing-masing 4,79, 12,84, 2,88, dan 2,45 pada 2019. Bahkan belakangan, saat Indonesia memasuki gelombang kedua, peningkatan pengujian belum memadai dan masih peringkat relatif rendah dibandingkan dengan negara lain yang juga terpukul parah oleh varian Delta (Gambar C). Pada 22 Juli 2021, Indonesia hanya memiliki 0,57 tes harian 7 hari per 1.000 orang, sementara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam masing-masing memiliki 12,14, 3,73, 0,92, dan 0,79 tes harian 7 hari per 1.000 orang.

Akhirnya, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, fokus pemerintah pada tahun 2021 akan meningkatkan hasil yang baik pada tahun 2022 dan mempercepat pemulihan baik dari segi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan tentunya mobilitas

masyarakat yang tetap patuh protokol kesehatan. Investasi juga perlahan pulih terutama di sisi ekspor dan impor yang juga menunjukkan pemulihan yang sangat kuat.

Bagian 2

KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi, proses dimana kekayaan suatu negara meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun istilah ini sering digunakan dalam diskusi kinerja ekonomi jangka pendek, dalam konteks teori ekonomi umumnya mengacu pada peningkatan kekayaan selama periode yang diperpanjang.

Pertumbuhan dapat digambarkan sebagai proses transformasi. Apakah seseorang memeriksa ekonomi yang sudah modern dan terindustrialisasi atau ekonomi pada tahap pembangunan yang lebih awal, orang menemukan bahwa proses pertumbuhan tidak merata dan tidak seimbang. Sejarawan ekonomi telah berusaha untuk mengembangkan teori tahapan yang harus dilalui oleh setiap ekonomi seiring pertumbuhannya. Para penulis awal, yang diberi metafora, sering menekankan kemiripan antara karakter evolusioner pembangunan ekonomi dan kehidupan manusia—misalnya, pertumbuhan, kedewasaan, dan dekadensi. Penulis selanjutnya, seperti ekonom Australia Colin Clark, telah menekankan dominasi berbagai sektor ekonomi pada berbagai tahap perkembangan dan

modernisasinya. Bagi Clark, pembangunan adalah proses dominasi berturut-turut oleh produksi primer (pertanian), sekunder (manufaktur), dan tersier (perdagangan dan jasa). Untuk ekonom Amerika W.W. Rostow, pertumbuhan berlangsung dari masyarakat tradisional ke masyarakat transisi (di mana fondasi pertumbuhan dikembangkan), ke masyarakat "lepas landas" (di mana pembangunan dipercepat), ke masyarakat yang matang. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan pergerakan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kewirausahaan dan investasi adalah dua faktor yang paling sering dianggap kritis.

Pertumbuhan ekonomi biasanya dibedakan dari pembangunan ekonomi, istilah terakhir dibatasi untuk ekonomi yang dekat dengan tingkat subsisten. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk perekonomian yang telah mengalami peningkatan pendapatan per kapita. Dalam ungkapan Rostow, pertumbuhan ekonomi dimulai di suatu tempat antara tahap lepas landas dan tahap kedewasaan; atau dalam istilah Clark, antara panggung yang didominasi oleh primer dan panggung yang didominasi oleh produksi sekunder. Aspek yang paling mencolok dalam pembangunan seperti itu pada umumnya adalah penurunan yang sangat besar dalam proporsi angkatan kerja yang dipekerjakan di pertanian. Ada aspek lain dari pertumbuhan.

Penurunan pertanian dan kebangkitan industri dan jasa telah menyebabkan konsentrasi penduduk di kota-kota, pertama di tempat yang kemudian digambarkan sebagai "kota inti" dan kemudian di pinggiran kota. Pada tahun-tahun sebelumnya, investasi utilitas publik (termasuk investasi dalam transportasi) lebih penting daripada investasi manufaktur, tetapi dalam perjalanan pertumbuhan hubungan ini terbalik. Ada juga peningkatan pentingnya barang konsumsi tahan lama dalam output total. Dalam pengalaman AS, tingkat pertumbuhan produksi barang modal pada mulanya melebihi tingkat pertumbuhan output total, tetapi kemudian hal ini juga terbalik. Demikian pula, pengeluaran bisnis konstruksi atau pabrik tampak besar pada periode sebelumnya sebagai objek investasi bisnis dibandingkan dengan era sekarang. Apakah negara lain akan mengalami pengalaman yang sama pada tahap pertumbuhan yang sama masih harus dilihat.

Perbandingan tingkat pertumbuhan untuk sekelompok negara maju menunjukkan betapa tidak meratanya proses pertumbuhan. Sebagian ketidakrataan ini mencerminkan sifat luar biasa dari periode 1913–50, yang mencakup dua perang besar dan depresi yang parah dan berkepanjangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam tingkat pertumbuhan di berbagai negara antara periode

1870–1913 dan 1950–73 dan periode sejak 1973. Sebagian besar, perbedaan ini menunjukkan percepatan laju pertumbuhan dari pertama hingga periode kedua dan penurunan tajam dalam tingkat pertumbuhan dari periode kedua ke periode saat ini. Banyak penulis mengaitkan hal ini dengan pertumbuhan investasi bisnis yang lebih cepat selama pertengahan tiga periode.

Tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi untuk Jerman Barat, Jepang, dan Italia pada periode pasca-Perang Dunia II telah mendorong banyak diskusi. Sering dikatakan bahwa "pemula yang terlambat" dapat tumbuh lebih cepat karena mereka dapat meminjam teknologi canggih dari pemula yang lebih awal. Dengan cara ini mereka melompati beberapa tahap perkembangan yang terpaksa dilalui oleh para pemula awal. Argumen ini tidak lebih dari pernyataan bahwa pemula yang terlambat akan tumbuh dengan cepat selama periode ketika mereka melakukan modernisasi. Italia tidak berhasil berkembang pesat dan dengan demikian memodernisasi sampai setelah Perang Dunia II. Bersama dengan Jepang dan Jerman juga mengalami kerusakan perang yang cukup besar. Ini memiliki efek yang mirip dengan memulai terlambat, karena pemulihan dari perang memerlukan pembangunan persediaan modal yang akan, dengan hal lain dianggap sama, mewujudkan teknologi paling maju dan oleh

karena itu menjadi lebih produktif dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat. Bagian lain dari argumen ini adalah pernyataan bahwa para pemula sebenarnya terhalang untuk memperkenalkan secara luas teknologi baru yang mereka kembangkan sendiri. Misalnya, perusahaan-perusahaan di negara yang lebih awal melakukan industri mungkin terhambat untuk memperkenalkan alat transportasi yang lebih modern dan efisien dalam skala luas karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan lain yang menangani tugas-tugas tambahan bongkar muat juga akan memodernisasi untuk membuat perubahan itu menguntungkan.

Terkait dengan ini adalah masalah apakah tingkat pendapatan per kapita dan tingkat pertumbuhannya di negara maju pada akhirnya akan menyatu atau menyimpang. Misalnya, ketika pendapatan per kapita dari negara-negara penanam cepat seperti Italia dan Jepang mendekati negara-negara yang berkembang lebih awal, seperti Amerika dan Inggris, apakah tingkat pertumbuhan yang pertama akan melambat? Para ekonom yang menjawab dengan tegas menekankan kesamaan pola permintaan yang berubah seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Penekanan ini pada gilirannya menyiratkan bahwa semakin kecil peluang untuk meminjam teknologi dari para pemimpin industri karena tingkat pendapatan para pemula

yang terlambat mendekati tingkat pendapatan yang lebih makmur. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita dalam masyarakat yang makmur biasanya disertai dengan pergeseran permintaan terhadap layanan. Oleh karena itu, demikian argumen ini, perbedaan tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan antar negara pada akhirnya akan menyempit karena rendahnya pertumbuhan produktivitas di sektor jasa. Buktinya tidak meyakinkan. Di satu sisi, pertumbuhan adalah fungsi dari sesuatu yang lebih dari kemampuan untuk meminjam teknologi terbaru; di sisi lain, tidak jelas bahwa produktivitas harus selalu tumbuh pada tingkat yang lebih lambat di industri jasa.

Populasi yang meningkat pesat tidak jelas merupakan keuntungan atau kerugian bagi pertumbuhan ekonomi. Simon Kuznets dari Amerika dan peneliti lainnya menemukan sedikit hubungan antara tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan GNP per kapita. Beberapa ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah mereka yang memiliki populasi stabil. Dan di Amerika Serikat, di mana laju pertumbuhan penduduk telah menunjukkan tren historis yang menurun, laju pertumbuhan GNP per kapita telah meningkat selama satu setengah abad terakhir. Temuan lain oleh Kuznets adalah bahwa sementara GNP per kapita pada

tahun 1960 secara substansial lebih tinggi di Amerika Serikat daripada di negara Eropa mana pun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan per kapita dari semua negara ini selama periode 1840 hingga 1960 secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah bahwa Amerika Serikat mulai dari basis per kapita yang lebih tinggi; ini mungkin karena sumber daya alamnya yang unggul, terutama lahan pertaniannya yang subur.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam membahas teori pertumbuhan, perbedaan harus dibuat antara teori yang dirancang untuk menjelaskan pertumbuhan (atau kurangnya pertumbuhan) di negara-negara yang sudah maju dan mereka yang peduli dengan negara-negara yang terjebak dalam keadaan kemiskinan. Sebagian besar dari apa yang berikut akan terbatas pada yang pertama.

Seperti yang ditunjukkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1930-an, tabungan dan investasi biasanya tidak dilakukan oleh orang yang sama. Keinginan untuk menabung tidak serta merta menghasilkan investasi. Jika penabung berusaha untuk menyimpan bagian yang lebih besar dari pendapatan mereka dari sebelumnya (sehingga mengkonsumsi lebih sedikit) dan jika ini tidak

diimbangi dengan peningkatan yang sama dalam keinginan orang lain untuk berinvestasi, total pengeluaran akan menurun. Reaksi alami dari pihak bisnis adalah mengurangi produksi, sehingga mengurangi pendapatan yang diperoleh dari produksi. Efek terakhir mungkin merupakan gerakan kumulatif ke bawah karena permintaan total menjadi tidak cukup untuk mempekerjakan semua angkatan kerja.

Terputusnya arus melingkar pendapatan dan pengeluaran ini menunjukkan kemungkinan ekonomi kapitalis secara bergantian mengalami periode pengangguran yang berkepanjangan dan parah (ketika tabungan yang diinginkan pada kesempatan kerja penuh melebihi apa yang ingin diinvestasikan oleh perekonomian pada kesempatan kerja penuh) dan periode inflasi yang serius (ketika ketidaksetaraan dibalik). Situasi ini belum pernah terjadi secara historis untuk negara maju sampai awal 1970-an. Dalam diskusi berikut, beberapa perhatian akan diberikan pada cara-cara di mana berbagai teori pertumbuhan menjelaskan fakta sejarah yang penting ini.

Peran pengusaha

Teori pertumbuhan modern dapat dikatakan dimulai dari Joseph A. Schumpeter. Tidak seperti kebanyakan ahli teori

Keynesian atau pra-Keynesian, Schumpeter memberikan penekanan utama pada peran wirausahawan, atau pengusaha. Kualitas kinerjanya lah yang menentukan apakah modal akan tumbuh dengan cepat atau lambat dan apakah pertumbuhan ini akan melibatkan inovasi dan perubahan—yaitu, pengembangan produk baru dan teknik produktif baru. Perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara dan antara periode yang berbeda di satu negara dapat ditelusuri sebagian besar ke kualitas kewirausahaan. Yang terakhir pada gilirannya mencerminkan nilai-nilai sejarah dan budaya tertentu yang dibawa oleh kelas bisnis. Schumpeter juga menghubungkan sebagian besar pertumbuhan kemajuan teknis dan pasokan tenaga kerja kepada pengusaha. Jadi, dalam terminologi yang lebih modern, penjelasan Schumpeter tentang mengapa permintaan dan penawaran tumbuh kurang lebih pada tingkat yang sama adalah bahwa penawaran disesuaikan dengan permintaan sementara permintaan pada gilirannya mencerminkan aktivitas dan investasi pengusaha.

Schumpeter percaya bahwa kapitalisme dengan keberhasilannya “menabur benih kehancurannya sendiri.” Ekonom Amerika Alvin H. Hansen berargumen pada akhir 1930-an bahwa kapitalisme sedang bermasalah di Amerika Serikat karena alasan

lain. Menurut Hansen, penutupan perbatasan geografis, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan karakter penghematan modal dari inovasi-inovasi baru-baru ini, semuanya telah meningkatkan kemungkinan stagnasi dengan mengurangi kebutuhan akan investasi. Tabungan yang tersedia dalam perekonomian yang matang akan cenderung melebihi jumlah yang ingin diinvestasikan oleh perekonomian (pada tingkat kesempatan kerja penuh) dan dengan jumlah yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Kondisi ini tentu saja akan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran seiring dengan melebarnya kesenjangan antara permintaan dan potensi output. Pandangan Hansen sangat diwarnai oleh kondisi ekonomi tahun 1930-an. Catatan tiga dekade setelah Perang Dunia II banyak membantu mengatasi pesimisme yang ditimbulkan oleh *The Great Depression*.

Peran investasi

Dalam Teori Umum Keynes, investasi memainkan peran kunci dalam hal itu disajikan sebagai faktor paling penting yang mengatur tingkat pengeluaran dalam suatu perekonomian, meskipun faktanya biasanya hanya seperlima hingga seperenam dari total pengeluaran. Paradoks ini dapat dipahami dari segi konsep yang juga dikembangkan pada tahun 1930-an, yaitu multiplier. Pengganda

adalah jumlah di mana perubahan investasi akan dikalikan dalam mencapai efek akhirnya pada pendapatan atau pengeluaran. Jika, misalnya, investasi meningkat sebesar \$10, pengeluaran \$10 tambahan akan menghasilkan, dengan asumsi sumber daya yang menganggur, tambahan \$10 produksi dan selanjutnya pendapatan dalam bentuk upah dan laba. Namun, peningkatan ini bukanlah akhir dari masalah karena sebagian besar pendapatan tambahan yang diperoleh akan digunakan untuk barang-barang konsumsi. Jika sembilan persepuluh dari setiap perubahan pendapatan dihabiskan untuk barang-barang konsumsi dan sepersepuluh ditabung, konsumsi akan meningkat sebesar \$9. Tetapi sekali lagi, pengeluaran satu orang adalah pendapatan orang lain, sehingga pendapatan sekarang naik sebesar \$9 di mana \$8,1 dibelanjakan untuk barang-barang konsumsi. Proses berlanjut sampai pengeluaran, pendapatan, dan produksi meningkat sebesar \$100, di mana \$90 adalah konsumsi dan \$10 perubahan awal dalam investasi. Dalam hal ini penggandanya adalah 10.

Tetapi investasi dapat menjadi sumber ketidakstabilan jika tidak dipertahankan pada tingkat yang cukup untuk merangsang permintaan untuk produksi yang diciptakannya. Apakah ada jaminan bahwa pasokan atau kapasitas produksi akan tumbuh pada tingkat

yang sama dengan permintaan sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas maupun kelebihan permintaan? Ekonom Inggris R.F. Harrod dan ekonom Amerika E.D. Domar menempatkan pertanyaan ini dalam bentuk matematika yang sangat sederhana. Dalam persamaan mereka, tingkat pertumbuhan penawaran (yaitu, fungsi produksi seperti yang didefinisikan di atas) sama dengan tingkat pertumbuhan persediaan modal. Melalui investasi stok modal ini ditambah. Tingkat pertumbuhan permintaan tergantung pada tingkat pertumbuhan investasi atau, lebih tepatnya, pada tingkat pertumbuhan pengeluaran nonkonsumsi. Jadi investasi mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tetapi analisis Harrod-Domar masih belum menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat sistem ini tidak menjadi semakin tidak stabil.

Permintaan dan penawaran

Banyak teori pertumbuhan kontemporer dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembangkan model teoretis yang akan membawa laju pertumbuhan permintaan dan laju pertumbuhan penawaran sejalan, karena model yang menyiratkan bahwa sistem kapitalis secara inheren tidak stabil tidak akan sesuai dengan sejarah historis. fakta. Model pertumbuhan dapat diklasifikasikan menurut apakah mereka menekankan penyesuaian permintaan (model yang

ditentukan pasokan) atau penyesuaian dalam penawaran (model yang ditentukan permintaan). Salah satu contoh model penentuan penawaran yang lebih terkenal dikembangkan oleh ekonom Inggris J.R. Hicks. Hicks berasumsi bahwa kecenderungan belanja konsumen dan investor sedemikian rupa sehingga menyebabkan permintaan tumbuh pada tingkat yang melebihi tingkat pertumbuhan output maksimum. Asumsi ini berarti bahwa selama "booming" apa pun, ekonomi pada akhirnya akan mengalami "plafon" yang, sementara juga bergerak ke atas, bergerak lebih lambat daripada permintaan. Laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan ditentukan oleh laju kenaikan pagu, yang pada gilirannya akan bergantung pada faktor-faktor penawaran seperti laju pertumbuhan angkatan kerja dan laju pertumbuhan kemajuan teknis atau produktivitas. . Jika untuk beberapa alasan ini tumbuh lebih cepat, maka output juga akan tumbuh lebih cepat karena permintaan disesuaikan ke atas dengan pertumbuhan pasokan yang lebih cepat.

Contoh model pertumbuhan yang ditentukan permintaan adalah yang dikembangkan oleh ekonom Amerika J.S. Duesenberry. Dalam model Duesenberry, kecenderungan belanja konsumen dan investor sedemikian rupa sehingga menghasilkan pertumbuhan permintaan yang stabil. Asumsikan bahwa alih-alih membelanjakan

sembilan persepuluh dari setiap perubahan pendapatan untuk barang-barang konsumsi, seperti pada contoh pengganda di atas, mereka memilih untuk membelanjakan 0,95. Peningkatan ini akan menyebabkan laju pertumbuhan permintaan meningkat. Pertanyaannya adalah apakah hal itu juga akan menyebabkan laju pertumbuhan produksi meningkat atau hanya akan mengakibatkan kenaikan harga. Jika produktivitas atau kemajuan teknis merespons tingkat pertumbuhan permintaan yang lebih tinggi, seperti yang diasumsikan Duesenberry, maka produksi dapat tumbuh lebih cepat. Meskipun dalam model Hicks dan Duesenberry permintaan dan penawaran tumbuh pada tingkat yang sama, mekanisme penyesuaiannya sama sekali berbeda. Dalam model Duesenberry, pasokan menyesuaikan dengan permintaan; dalam model Hicks, permintaan menyesuaikan dengan penawaran.

Model pertumbuhan lainnya juga menggambarkan perbedaan antara pertumbuhan yang ditentukan oleh permintaan dan yang ditentukan oleh penawaran. Ekonom Inggris N. Kaldor berasumsi bahwa ada mekanisme di tempat kerja yang menghasilkan kesempatan kerja penuh. Secara sederhana, dalam modelnya tingkat investasi yang tidak memadai akan diimbangi oleh pergeseran distribusi pendapatan antara keuntungan dan upah, yang akan

menyebabkan konsumsi berubah sebagai kompensasi sehingga permintaan keseluruhan tidak berubah. Meskipun ada perbedaan penting antara model Hicks dan Kaldor, keduanya dapat digambarkan sebagai model pertumbuhan yang ditentukan oleh penawaran.

Model lain dari pertumbuhan yang ditentukan oleh penawaran adalah yang tersirat dalam analisis neoklasik tradisional. Mekanisme yang menyesuaikan permintaan dengan peningkatan pasokan adalah mekanisme harga, atau “tangan tak terlihat” Adam Smith dari pasar. Jenis model ini mengasumsikan dunia tanpa monopoli dan ketidakpastian, di mana pasar barang modal dan tenaga kerja bebas menyesuaikan diri dengan cepat sehingga “pasar selalu bersih” dalam jangka pendek.

Contoh terakhir dari model pertumbuhan yang menggambarkan masalah penyesuaian antara penawaran dan permintaan dapat ditemukan dalam karya ekonom Belanda Jan Tinbergen dan para pengikutnya. Berbeda dengan model pertumbuhan neoklasik di mana pasar membawa penyesuaian permintaan terhadap penawaran, model “instrumen target” dari Tinbergen mengasumsikan bahwa pemerintah (seperti di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya) berusaha untuk mengatur permintaan dan penawaran dalam upaya untuk mencapai target

tertentu seperti kesempatan kerja penuh atau tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, para ekonom diharapkan untuk memberikan kepada otoritas fiskal sebuah model yang mendekati cara kerja perekonomian dan yang menunjukkan apa yang akan terjadi jika pemerintah, katakanlah, tidak mengubah program pajak dan pengeluarannya di periode mendatang. Prakiraan ini dinilai dari segi apa yang dianggap diinginkan oleh pihak berwenang sebagai masalah kebijakan sosial dan ekonomi.

Jika tampaknya pengangguran akan terlalu tinggi dan tingkat pertumbuhan terlalu rendah, pihak berwenang mengambil tindakan pencegahan. Pemerintah dapat, misalnya, memotong pajak atas keuntungan perusahaan untuk merangsang investasi. Jika investasi berlebihan dan ada bahaya inflasi, pemerintah dapat mengambil tindakan lain untuk mengurangi permintaan agregat seperti memotong pengeluarannya. Jenis prosedur perencanaan ini telah dicoba dengan berbagai tingkat keberhasilan. Swedia dan Belanda adalah contoh yang menonjol dari upaya untuk mengimbangi fluktuasi pengeluaran swasta untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan. Perlu dicatat bahwa model-model ini tidak cocok dengan klasifikasi yang ditentukan oleh permintaan atau yang ditentukan oleh penawaran. Dalam contoh yang baru saja diberikan,

baik tingkat pertumbuhan permintaan maupun tingkat pertumbuhan penawaran secara efektif ditentukan oleh otoritas fiskal.

Stagnasi ekonomi

Kenaikan tingkat pengangguran dan perlambatan tingkat pertumbuhan GNP dan pendapatan per kapita di seluruh dunia kapitalis yang dimulai pada awal 1970-an jelas merupakan kasus di mana permintaan dan penawaran tidak tumbuh pada tingkat yang sama. Banyak ekonom mengalihkan perhatian mereka untuk mengembangkan teori untuk menjelaskan periode stagnasi yang berkepanjangan ini. Tema umum dalam banyak pekerjaan mereka adalah efek buruk dari pengangguran yang tinggi dan pemanfaatan yang rendah dari stok modal pada investasi dan, oleh karena itu, pada pertumbuhan produktivitas.

Tingkat pengangguran yang tinggi untuk tenaga kerja dan modal pada awalnya ditelusuri ke kebijakan yang membatasi permintaan agregat yang dikejar oleh otoritas moneter dan fiskal dari paruh pertama tahun 1970-an. Respons kebijakan ini secara luas ditafsirkan oleh para ekonom sebagai upaya pihak berwenang untuk mengurangi tingkat inflasi yang mulai meningkat pada akhir tahun 1960-an. Penggunaan kebijakan restriktif yang berkelanjutan kemudian terkait dengan ketakutan di pihak pihak berwenang bahwa

setiap upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi mereka hanya akan mengembalikan inflasi.

Pasar tenaga kerja yang lebih ketat yang dihasilkan dari kebijakan stimulatif seperti itu terlihat meningkatkan daya tawar tenaga kerja, sehingga menyebabkan tuntutan upah yang lebih besar dan penyelesaian yang pada gilirannya memberi makan harga, menyebabkan inflasi harga meningkat. Hal ini menyebabkan tuntutan upah yang lebih tinggi untuk melindungi upah riil dan dengan demikian spiral upah-harga yang eksplosif. Selain itu, kebijakan permintaan agregat yang lebih stimulatif dianggap mengakibatkan kesulitan neraca pembayaran pada nilai tukar yang ada. Tetapi setiap upaya untuk menghindari defisit pembayaran yang lebih besar dengan mengurangi nilai tukar mengarah pada "impor" inflasi melalui harga barang-barang impor yang lebih tinggi. Akibat dari pertimbangan tersebut adalah keengganan pihak berwenang untuk berupaya menciptakan lapangan kerja penuh melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat stimulatif.

Apa yang muncul dari teori-teori ini adalah rantai sebab-akibat yang menggambarkan cara di mana, dalam periode sejak Perang Dunia II, inflasi dan pertumbuhan menjadi hubungan kausal melalui respons pemerintah terhadap tekanan inflasi aktual dan yang

diantisipasi. Inflasi dan ketakutan akan inflasi menyebabkan pertumbuhan yang lambat dan pengangguran yang tinggi karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi pada kesempatan kerja penuh dengan cara lain—misalnya, kebijakan pendapatan—menghambat pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan untuk memerangi atau mencegah tekanan inflasi. Respons semacam itu mengarah, seperti yang mereka lakukan pada awal 1970-an, tidak hanya pada tingkat pengangguran modal dan tenaga kerja yang tinggi, tetapi juga pada tingkat pertumbuhan investasi dan produktivitas yang rendah. Stagnasi adalah hasilnya, dan skenario seperti itu adalah kemungkinan prospek kapitalisme di masa depan.

Perdagangan luar negeri

Sedikit yang telah dikatakan tentang perdagangan luar negeri. Namun pertumbuhan di sebagian besar ekonomi sangat bergantung pada impor dan kemampuan mengekspor untuk membayar impor. Fakta bahwa beberapa ekonomi pulih relatif cepat dari Perang Dunia II dan tumbuh jauh lebih cepat pada periode pascaperang daripada yang lain telah mendorong banyak analisis komparatif dalam teori pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi di Jepang dan Jerman dibandingkan dengan kelesuan umum ekonomi Inggris terkait

dengan perdagangan luar negeri. Para ekonom telah menunjuk pada krisis neraca pembayaran periodik yang dialami oleh Inggris dan kurangnya krisis semacam itu di Jerman. Selama boom, ketika pendapatan meningkat, permintaan impor akan meningkat juga sebagai ciri alami kemakmuran. Tetapi jika ekspor tidak juga meningkat pada saat yang sama, pihak berwenang mungkin terpaksa mengambil tindakan fiskal atau moneter dan memperlambat perekonomian dalam upaya mengembalikan keseimbangan impor dan ekspor. Atau ekspor mungkin gagal tumbuh cukup karena biaya tenaga kerja meningkat sangat cepat dan mendorong harga ekspor lebih cepat daripada di negara-negara pesaing.

Kebijakan mendorong pertumbuhan berdampak menjaga permintaan impor tetap tinggi dan memperketat pasar tenaga kerja, sehingga cenderung mendongkrak tingkat upah uang. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga cenderung mendorong inovasi dan proyek investasi yang sangat produktif, terutama jika tekanan permintaan terus berlanjut. Kebijakan “berhenti” tentu saja memiliki efek yang berlawanan, baik dan buruk dari sudut pandang neraca pembayaran suatu negara. Pertanyaannya adalah kebijakan mana yang dalam jangka panjang akan menghasilkan kenaikan biaya dan harga yang tidak terlalu cepat. Banyak penulis berpendapat bahwa

jika tekanan permintaan dipertahankan, respons atau penyesuaian produktivitas dan oleh karena itu pasokan terhadap tekanan ini akan sedemikian rupa sehingga negara akan segera menemukan dirinya dalam posisi yang lebih kompetitif. Menjalankan ekonomi "flat out", bagaimanapun, kemungkinan akan menyebabkan krisis neraca pembayaran jangka pendek dan menyebabkan devaluasi mata uang.

Teori pertumbuhan matematika

Selain teori yang dibahas di atas, banyak literatur telah dikembangkan yang melibatkan model matematika abstrak. Karena bidang analisis ini sangat teknis, hanya gambaran umum dari jenis masalah dan pertanyaan yang dibahas yang dapat diberikan. Pertama, serangkaian persamaan dibuat untuk menggambarkan apa yang dirasakan oleh pembuat model sebagai hubungan penting antara variabel ekonomi seperti output, modal, investasi, dan konsumsi. Persamaan ini harus menghubungkan variabel ekonomi satu sama lain pada titik waktu yang berbeda: misalnya, output tahun lalu menentukan konsumsi tahun ini, yang pada gilirannya membantu menentukan output tahun ini dan oleh karena itu konsumsi dan output tahun depan. Dimungkinkan untuk menghitung pergerakan variabel selama periode yang diinginkan. Inti dari sebagian besar analisis ini adalah konsep tingkat pertumbuhan kondisi mapan: di mana semua

variabel ekonomi yang terkandung dalam rangkaian persamaan tumbuh pada tingkat konstan yang sama dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Sebuah kelas studi terkait mencoba untuk memperhitungkan kesejahteraan pekerja dan konsumen dalam memaksimalkan pertumbuhan. Model “pertumbuhan optimal” ini berusaha memaksimalkan kepuasan konsumen dari waktu ke waktu. Dalam model seperti ini solusinya tidak akan menjadi tingkat pertumbuhan setinggi mungkin tetapi solusi yang akan memaksimalkan kesejahteraan konsumen. Pentingnya model semacam itu bagi para perencana tampaknya bergantung pada realisme asumsi mereka mengenai keinginan konsumen dan teknologi.

Pembuatan model dan teori tentang pertumbuhan telah berlangsung pada berbagai tingkat abstraksi. Beberapa karya memiliki nilai praktis yang kecil, dalam arti bahwa nilai penjelasannya dapat diabaikan. Studi semacam itu, bagaimanapun, dapat merangsang pekerjaan lain yang membantu dalam pemahaman tentang proses pertumbuhan. Beberapa model, meskipun realistis, tidak berlaku untuk semua ekonomi. Dengan demikian, model yang mengabaikan perdagangan internasional tidak banyak berguna bagi

ekonomi Eropa yang mencoba memahami penyebab yang lebih mendasar dari perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ketahui apa saja faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan.

Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi tiga jenis diantaranya Sumber Daya Alam Hayati (sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan, Sumber Daya

Alam non Hayati (sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup.

Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam), Sumber Daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali (Contoh sumber daya aini diantaranya Hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dengan jangka waktu yang lama (Minyak bumi, batu bara, dan gas alam), Terakhir sumber daya alam yang kekal yang tak akan habis (Contoh sumber daya ini diantaranya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi.

Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya

tersebut. Sumber Daya Manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya namun lebih kepada efisiensinya. Dalam mendorong Sumber Daya Manusia dapat bekerja secara efisien berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:

Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) – Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Oleh karenanya memberikan motivasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu hal yang wajib dilakukan.

Sesuaikan Pekerjaan dengan Kemampuan dan Minat Sumber Daya Manusia (SDM) – Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) akan kurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karenanya harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya terhadap sesuatu.

Program Pelatihan – Memberikan program pelatihan kepada para Sumber Daya Manusia (SDM) juga akan membantu meningkatkan skillnya. Program pelatihan harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran serta sesuai dengan data yang valid. Perpedoman pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang optimal.

Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkala – Dalam mengontrol kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam periode yang ditentukan, diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimiliki.

3. Akumulasi Modal

Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal.

Kaitan antara Akumulasi Modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto (investasi bruto) dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam model pertumbuhan ekonomi Harod-Domar meningkatnya tingkat tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek.

4. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

5. Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab Perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi, jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi.

Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya.

Perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai menunjang kesejahteraan para penduduknya. Karenanya Perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), modal, hingga faktor produksi lainnya.

6. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi.

Selain itu Aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat, atau kelembagaan masyarakat, Tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi. Sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi.

Karenanya hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib.

METODE PENGUKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus berada dalam focus perhatian untuk kemudian ditingkatkan secara terus menerus karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah serta jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan menuju keadaan yang lebih baik serta sejahtera sejahtera dari waktu ke waktu bagi para rakyatnya.

Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai penambahan pendapatan nasional atau penambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pendapatan riil nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu indikator lainnya adalah pendapatan riil per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari

tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif.

Tak hanya itu kesejahteraan penduduk juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sebab terkait pendapatan riil per kapita. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat ekonomi ke arah yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Tersedianya lapangan kerja kemudian akan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga secara otomatis, saat hal ini terjadilah pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara terjadi. Artinya, produktivitas meningkat.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

1. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun, dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam Gross National Product (GNP),

sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam Gross National Product (GNP).

Pendapatan yang termasuk dalam Gross National Product (GNP) juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau Gross National Product (GNP) adalah dengan cara membandingkan Gross National Product (GNP) di periode ini dengan Gross National Product (GNP) pada periode sebelumnya.

2. **Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)**

Jika Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya.

Jadi semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan Gross Domestic Product (GDP). Meski demikian pendapatan yang dihasilkan oleh warga

negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak termasuk ke hitungan GDP.

Bagian 3

KONDISI KEMISKINAN INDONESIA

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas kebijakan utama Pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mencapai tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pengentasan kemiskinan. Ketersediaan tingkat kemiskinan yang akurat di setiap daerah yang dapat dibandingkan di tingkat nasional merupakan prasyarat mutlak untuk mengembangkan kebijakan pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan memiliki beberapa fungsi dalam pembangunan nasional.

Fungsi pertama adalah memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan nasional, termasuk kebijakan dan rencana peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sektoral. Fungsi kedua, digunakan dalam penargetan, didasarkan pada letak geografis dan individu dan rumah tangga yang menjadi sasaran program pembangunan. Fungsi ketiga adalah menentukan alokasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Keempat, sebagai indikator pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan termasuk pencapaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Fungsi terakhir adalah sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah pusat dan daerah. Indikator pembangunan berjalan sangat dinamis sejalan dengan respon program dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan perkiraan tingkat kemiskinan untuk periode tertentu yang selaras dengan perkembangan indikator penyusunnya. Angka kemiskinan diperlukan oleh pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat mencapai target sesuai dengan rencana. Dinamika indikator makro setidaknya berdampak pada angka kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa indikator utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memperkirakan tingkat kemiskinan: tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk. Dengan adanya indikator-indikator yang tersedia, indikator-indikator utama ini lebih dinamis daripada garis kemiskinan sehingga perlu dipantau lebih awal untuk memperkirakan garis kemiskinan pada periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas pendapatan agregat. Pertumbuhan ekonomi agregat merupakan cerminan dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada

periode tertentu. Dalam perhitungan angka kemiskinan, komponen utamanya adalah konsumsi rumah tangga per kapita. Besaran angka tersebut sedikit banyak dapat diperkirakan melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi umumnya dipublikasikan lebih awal dari angka kemiskinan, sehingga dapat digunakan sebagai leading indicator dalam memperkirakan angka kemiskinan. Inflasi menggambarkan perubahan harga kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, perubahan harga komoditas penting perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Di sisi lain, sekelompok barang tertentu berdampak langsung pada penghitungan angka kemiskinan, terutama 52 komoditas pangan dan 36 komoditas non-pangan. Komponen ini selanjutnya mempengaruhi ukuran garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan selama periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan penduduk menjadi salah satu dari tiga indikator penentu perhitungan angka kemiskinan. Pertumbuhan penduduk pada dasarnya menggunakan hasil perhitungan proyeksi penduduk yang biasanya disediakan oleh BPS. Angka ini menentukan perhitungan angka kemiskinan, terutama pada indikator jumlah penduduk miskin. Pemerintah belum memiliki perangkat atau format standar untuk memperkirakan tingkat kemiskinan untuk periode

tertentu di masa mendatang, meskipun indikator utama tersedia lebih awal dari angka kemiskinan. Kondisi ini, dengan demikian, menjadi dasar pentingnya mengembangkan model proyeksi kemiskinan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendeteksi capaian pengentasan kemiskinan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan.

Studi proyeksi kemiskinan ini berbeda dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, dalam studi ini, proyeksi kemiskinan dibuat pada semua indikator kemiskinan. Indikator yang dihasilkan antara lain: garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, dan pengeluaran per kapita yang merupakan instrumen utama perhitungan. Analisis dilakukan di tingkat nasional dan regional (provinsi, pedesaan, dan perkotaan) sesuai dengan indikator dalam publikasi resmi BPS. Kedua, penelitian ini mengukur dampak kenaikan harga terhadap pengeluaran per kapita sehingga dampak terhadap garis kemiskinan dapat diukur dengan mengamati perubahan pengeluaran per kapita. Ketiga, penelitian ini juga merumuskan metode yang dapat direplikasi oleh pengambil kebijakan dengan menggunakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perkiraan jumlah penduduk pada periode tertentu.

PERHITUNGAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Dalam menghitung kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan konsep kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dikenal dengan “pendekatan kebutuhan dasar”. Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok” adalah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup layak, yaitu pemenuhan kebutuhan minimal makanan dan bukan makanan. Dengan pendekatan ini, pengukuran kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam hal pengeluaran atau pendapatan untuk memenuhi kehidupan layak minimum berdasarkan jumlah minimum komoditas makanan (food basket) untuk memenuhi kebutuhan kalori, bersama dengan sejumlah pengeluaran non-makanan. (keranjang non-makanan). Pendapatan atau pengeluaran yang tidak mencukupi atau pendapatan untuk hidup layak minimum adalah pendekatan moneter atau garis kemiskinan atau garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum dalam rupiah (pendekatan moneter).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (Garis Kemiskinan Makanan: GKM) dan Garis Kemiskinan Non-

Makanan (Garis Kemiskinan Bukan Makanan: GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan pangan minimum sebesar 2.100 kalori per kapita per hari. Paket kebutuhan sembako diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak). GKBM merupakan paket kebutuhan dasar non-pangan untuk memenuhi kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

BPS adalah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menghitung dan memetakan angka resmi kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu. BPS telah menghitung kemiskinan sejak awal 1980-an dan menerbitkannya secara resmi pada tahun 1984. Publikasi tersebut mencakup angka kemiskinan periode 1976-1981. Sejak itu, setiap tiga tahun, BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia bersama dengan data konsumsi rumah tangga yang tersedia yang dikumpulkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sejak tahun 2002, penghitungan kemiskinan dilakukan setiap tahun melalui survei modul konsumsi rumah tangga SUSENAS.

INDIKATOR UTAMA TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat inflasi

Tingkat inflasi secara umum dipublikasikan oleh BPS melalui Berita Resmi Statistik (BRS) pada minggu pertama setelah akhir bulan laporan. Misalnya, tingkat inflasi bulan Maret diterbitkan pada minggu pertama bulan April. Tingkat inflasi yang dimuat dalam publikasi ini meliputi inflasi bulanan, tahunan, dan tahun berjalan. Sedangkan angka kemiskinan dan indikatornya diterbitkan pada minggu pertama setelah survei triwulanan. Oleh karena itu, tingkat inflasi dalam penelitian ini telah ditetapkan sebagai indikator utama tingkat kemiskinan. Penetapan tingkat inflasi sebagai leading indicator didasarkan pada dampak inflasi terhadap tingkat kemiskinan dan menjadi angka yang dipublikasikan sebelum angka kemiskinan. Beberapa penelitian terkait dampak inflasi terhadap tingkat kemiskinan dan pengeluaran rumah tangga telah dilakukan. Untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap kesejahteraan masyarakat, Son dan Kakwani (2008) dan Son (2008) berasumsi bahwa pengeluaran per kapita merupakan fungsi harga (p) dan utilitas (μ) yang mencerminkan kebutuhan hidup.

$$x = [e(u, p)]$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita tergantung pada upaya individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diharapkan pada harga tertentu. Perubahan harga, seperti kenaikan pada p_i^* , memaksa individu-individu ini untuk mengkompensasi kenaikan harga untuk mencapai tingkat utilitas yang sama. Asumsi ini menjadi dasar bagi kedua peneliti ini untuk mengukur perubahan riil pengeluaran per kapita sebagai akibat dari kenaikan harga, yang kemudian dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\Delta x = -[e(u, p^*) - e(u, p)]$$

Dengan menerapkan aturan ekspansi Taylor, diperoleh persamaan berikut.

$$dx = - \sum_{i=1}^k \frac{\partial e}{\partial p_i} (p_i^* - p_i)$$

Persamaan di atas mengasumsikan bahwa tidak ada efek substitusi barang ketika terjadi kenaikan harga barang. Dari kenaikan relatif komoditi, dampak penurunan pengeluaran per kapita dapat dihitung sesuai dengan elastisitas harga komoditi, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\frac{p_i \partial x}{x \partial p_i} = - \frac{v_i(x)}{x}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan harga komoditas i sebesar 1 persen yang menyebabkan penurunan kesejahteraan individu sebesar persentase yang sebanding dengan pengeluaran per kapita individu untuk komoditas i terhadap total pengeluaran per kapitanya $(-\frac{v_i(x)}{x} \%)$.

Pada tingkat penduduk, dampak kenaikan harga memiliki prinsip yang sama dengan pengeluaran per kapita individu. Konsep perhitungan ini dimulai dengan mengubah konsep pengeluaran

individu per kapita $x = \sum_{i=1}^n v_i(x)$ ke dalam konsep pengeluaran per

kapita pada tingkat penduduk $\mu = \int_0^{\infty} x f(x) dx$. Dimana $f(x)$ adalah

fungsi kerapatan x . Untuk memperoleh elastisitas harga dari pengeluaran penduduk per kapita, persamaan berikut diturunkan terhadap harga, sehingga diperoleh rumus elastisitas sebagai berikut:

$$\frac{p_i \partial \mu}{\mu \partial p_i} = - \frac{\mu_i}{\mu} = - \bar{W}_i$$

Pengeluaran rata-rata per kapita seluruh penduduk untuk komoditi i ditandai sebagai μ_i . Sementara μ mencerminkan total pengeluaran per kapita seluruh penduduk. Sedangkan \bar{W}_i proporsi

rata-rata pengeluaran per kapita untuk komoditi i . Interpretasi persamaan ini identik dengan persamaan 6, di mana setiap

Kenaikan 1 persen pada komoditas i akan mengurangi kesejahteraan penduduk sebesar \bar{w}_i %, atau sama dengan elastisitas harga barang tersebut.

Mengingat bahwa perubahan harga komoditas berbeda-beda antara satu komoditas dengan komoditas lainnya, maka dampak yang dihasilkan antar komoditas akan berbeda. Untuk menangkap dampak perubahan harga masing-masing komoditas terhadap perubahan tingkat kesejahteraan, persamaan dapat disusun menjadi persamaan berikut:

$$\frac{\mu^* - \mu}{\mu} = \sum_{i=1}^n \frac{(p_i^* - p_i)}{p_i} \frac{\partial \mu}{\partial p_i} \frac{p_i}{\mu} = - \sum_{i=1}^n (p_i^* - 1) \bar{w}_i$$

Pertumbuhan ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB), baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Secara umum, PDB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit bisnis di suatu negara tertentu, atau jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. PDRB atas dasar harga

berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk mengamati struktur dan pergerakan ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Angka pertumbuhan ekonomi reguler diterbitkan oleh BPS melalui BRS selama minggu pertama di bulan kedua setelah laporan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi untuk kuartal pertama diterbitkan pada minggu pertama Mei. Laju pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan dalam publikasi ini meliputi pertumbuhan ekonomi triwulanan dan tahunan. Angka kemiskinan dan indikatornya dipublikasikan pada minggu pertama setelah survei tiga bulan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator utama tingkat kemiskinan dan didasarkan pada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini juga diterbitkan sebelum tingkat kemiskinan. Misalnya angka kemiskinan bulan Maret yang dipublikasikan BPS melalui BRS pada

minggu pertama bulan Juli sedangkan angka pertumbuhan ekonomi sudah dipublikasikan pada bulan Mei.

Pertumbuhan populasi

Pertumbuhan penduduk menunjukkan penambahan penduduk setiap tahun selama periode tertentu. Metode yang paling sering digunakan oleh BPS adalah metode geometrik, meskipun laju pertumbuhan penduduk juga dapat dihitung dengan menggunakan metode aritmatika atau eksponensial. Dalam setiap survei yang dilakukan BPS, pertumbuhan penduduk merupakan perubahan bobot individu, dan hal ini juga berimplikasi pada perhitungan angka kemiskinan. Proyeksi penduduk telah diterbitkan oleh BPS untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2045. Angka ini tersedia berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan provinsi, baik untuk daerah pedesaan maupun perkotaan. Merujuk pada publikasi tersebut, cukup relevan untuk menggunakan pertumbuhan penduduk sebagai salah satu leading indicator dalam membuat proyeksi indikator kemiskinan di Indonesia.

Bagian 4

INKLUSI KEUANGAN PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan juga merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi (Sarma, 2012).

Tentunya dengan sistem keuangan yang inklusif dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan untuk dapat menikmati akses terhadap layanan sistem keuangan. Inklusi keuangan juga merupakan upaya untuk memasukkan masyarakat unbankable ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta

transfer (Hannig and Jansen, 2010). Selain itu, inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi (Sarma, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat unbankable ke dalam layanan jasa keuangan formal dengan mengurangi berbagai macam hambatan untuk mengaksesnya.

Kegiatan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti G20, APEC, AFI, OECD dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Selain itu, keuangan inklusif juga telah masuk dalam 6 prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi kerangka kerja, implementasi dan langkah kedepan pelaksanaan keuangan inklusif.

Di India, inklusi keuangan menekankan pada proses untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan and kredit

yang memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, 2013). Hasil penelitian yang mengambil tempat penelitian di Peru mengungkapkan pentingnya perluasan akses bagi sebagian besar masyarakat terhadap portofolio produk dan jasa keuangan, seperti pinjaman, deposito, asuransi, pensiun, sistem pembayaran, serta mekanisme pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen (Reyes, 2010).

Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan. Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok. (Bank Indonesia, 2014).

Pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2017) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dengan meningkatnya

pertumbuhan ekonomi regional dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Sementara itu, inflasi regional dan tingkat pengangguran regional diharapkan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kemiskinan dan juga hal ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningsih (2018) yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan juga lewat penelitian Siyan (2016) dan Hoover (2003) yang menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sehingga ketika inflasi meningkat akan memangkas pendapatan riil masyarakat sehingga semakin sulit memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya angka kemiskinan meningkat, begitu juga dengan tingkat pengangguran yang menandakan rendahnya produktivitas masyarakat dan pada akhirnya akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehingga kemiskinan akan meningkat.

Isu kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di negeri ini. Terlebih saat seisi bangsa sedang hangat menyambut pesta demokrasi nasional yang diadakan setiap 5 tahun sekali, isu kemiskinan dapat menjadi peluru kampanye baik bagi petahana maupun bagi penantang. Namun tentu saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas perpolitikan nasional yang suhunya sehangat

secangkir kopi pagi pembaca. Maka cukuplah pembahasan isu kemiskinan ini sebagai salah satu tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak yaitu 25,95 juta orang miskin (9,82%), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2017 yaitu sebanyak 26,58 juta orang miskin (10,12%). Penurunan angka kemiskinan di Indonesia ini juga diikuti dengan penurunan gini ratio sebesar 0,002 poin dari posisi September 2017 sebesar 0,391 menjadi 0,389 pada Maret 2018.

Jika dilihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak berada di wilayah perdesaan dengan persentase sebesar 13,2% dibandingkan dengan wilayah perkotaan dengan persentase 7,02%. Terlebih jika dilihat sebarannya per pulau, tentu pembaca telah bisa menebak pulau mana dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Ya, angka kemiskinan di Papua, Bali Nusa Tenggara, dan Sulawesi masih cukup tinggi diantara wilayah lainnya.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2016, memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana SNKI dapat mewujudkan tujuan tersebut? Tentu hal terpenting adalah dengan menjamin akses layanan keuangan formal dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dewasa Indonesia.

Pintu masuk pertama yang dapat diketuk oleh masyarakat saat akan menikmati akses layanan keuangan formal adalah produk tabungan yang disediakan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Menabung akan mengajarkan masyarakat untuk mengelola keuangan dengan baik serta sekaligus dapat membangun catatan keuangan pribadi yang lebih terorganisir. Dengan demikian, masyarakat dapat melanjutkan ke level berikutnya yaitu berinvestasi baik untuk kesehatan, pendidikan, maupun untuk kesempatan berusaha. Bagi masyarakat yang ingin berusaha, dengan memiliki histori catatan keuangan yang baik akan memudahkan mereka untuk dapat mengakses kredit/pembiayaan, baik kredit program yang telah disediakan oleh pemerintah dengan suku bunga yang relatif rendah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit usaha lainnya. Seluruh aktivitas keuangan baik menabung, investasi, dan juga

kredit/pembiayaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keuangan inklusif juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar keuangan, terjaganya stabilitas keuangan, menghindari ketergantungan atas modal asing, serta terhindar dari efek berantai lainnya.

Inklusi Keuangan menunjukkan peningkatan secara global. Di Indonesia, sebesar 48,9% (92 juta) penduduk dewasa telah memiliki rekening. Namun satu perempat dari total rekening di negara – negara berkembang tidak aktif. Di Indonesia, 30% dari total rekening tergolong tidak aktif, dua kali lipat lebih besar dibanding dengan tahun 2014. Di Indonesia, lebih banyak masyarakat miskin cenderung tidak memiliki rekening dibandingkan masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan poin persentase sebesar 20%, dan 15% lebih besar kecenderungan masyarakat miskin yang memiliki rekening yang tidak aktif.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi, maka pemerintah mendorong terciptanya para wirausahawan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR yang merupakan

kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi, diberikan kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Program KUR yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, telah melalui beberapa evolusi kebijakan, khususnya skema penyalurannya. KUR yang disalurkan pada tahun 2007 – 2014 menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan KUR generasi kedua yang disalurkan sejak Agustus 2015 sampai dengan saat ini, disalurkan dengan skema subsidi bunga. Total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Juli 2018 sebesar Rp 289T dengan *outstanding* Rp 124T, dan NPL 1,09%. Sedangkan penyaluran KUR tahun 2018, sampai dengan 31 Juli 2018 sudah mencapai Rp 76T dgn NPL 0,04% (65% dari target tahun 2018 sebesar Rp 117,08 T). Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (64,7%) diikuti dengan skema KUR Kecil (34,9%) dan KUR TKI (0,4%). Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil. Penyaluran KUR masih didominasi dengan penyaluran di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 56,1%, diikuti dengan Sumatera 19,4% dan

Sulawesi 9,5%. Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia. Pemerintah terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi. Pada tahun 2018, target penyaluran KUR sektor produksi yaitu minimum sebesar 50% dari total penyaluran KUR. Sampai dengan 31 Juli 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) sebesar 40.4%. Diperlukan dorongan yang lebih kuat agar tercapai target penyaluran KUR di sektor produksi.

Seluruh program keuangan inklusif di Indonesia, yang salah satunya adalah KUR merupakan langkah pemerintah dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan formal kepada penduduk dewasa di Indonesia. Melalui program – program tersebut, diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun serta pertumbuhan ekonomi akan semakin merata.

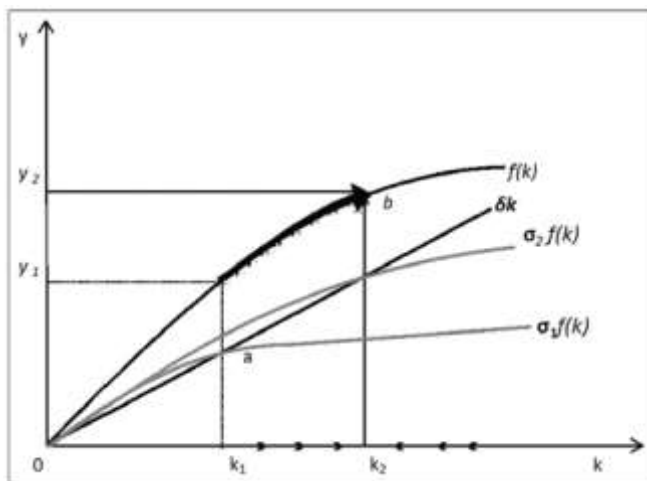
Bagian 5

TEORI PERKEMBANGAN KEUANGAN – PERTUMBUHAN EKONOMI

Studi tentang pengembangan keuangan telah mengidentifikasi empat bidang yang berbeda sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, adalah penyediaan alat pembayaran yang dapat diandalkan dan berbiaya rendah untuk semua, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kedua, adalah peran intermediasi keuangan dalam meningkatkan volume transaksi dan alokasi sumber daya dari unit surplus ke unit defisit ekonomi dan dalam proses meningkatkan distribusi sumber daya. Ketiga, berkaitan dengan efek manajemen risiko, bahwa sistem keuangan menyediakan dengan mengurangi risiko likuiditas, sehingga memungkinkan pembiayaan investasi dan inovasi yang berisiko tetapi lebih produktif dalam perekonomian dan keempat, sektor keuangan memberikan informasi tentang kemungkinan investasi dan ketersediaan modal dalam sistem, dengan demikian memperbaiki efek informasi asimetris.

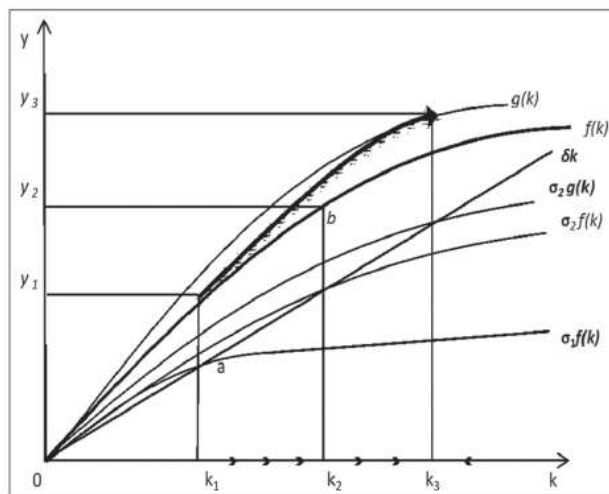
Dari perspektif fungsi produksi agregat, efek keuangan yang disebutkan di atas berkontribusi signifikan terhadap perubahan input

investasi dan tabungan menjadi output yang lebih besar dalam perekonomian, baik melalui saluran akumulasi modal atau saluran perubahan teknologi. Dengan mengambil saluran akumulasi modal sebagai contoh, Babajide, Adegboye, & Omankhanlen dalam penelitiannya, mengadopsi model Odeniran & Udaaja dalam mengembangkan model pertumbuhan Solow. Model tersebut mengasumsikan peningkatan tingkat tabungan, δ , akan meningkatkan tingkat modal (k) dan output per kapita (y). Pergeseran dalam δ , seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 2.5. Pergeseran dari δ_1 ke δ_2 menyebabkan kondisi mapan, k naik dari k^*1 ke k^*2 dan output per kapita naik dari y^*1 ke y^*2 .



Gambar 5.1. Efek Tabungan pada Akumulasi Modal

Analisis ini menyiratkan penghapusan represi keuangan dan pengurangan kegagalan pasar keuangan yang akan meningkatkan kualitas investasi karena hanya proyek dengan pengembalian lebih besar dari tingkat bunga (IR) yang akan didanai. Dengan demikian, seluruh fungsi produksi akan bergeser ke atas, dari $f(k)$ ke $g(k)$. Peningkatan efisiensi ekonomi akan semakin meningkatkan penghematan karena $\delta^2 g(k) > \delta^2 f(k)$, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. Ini dapat dilihat dari Gambar 2 bahwa tingkat *steady-state* baru dari persediaan modal per-pekerja dan output per-pekerja, k^* dan y^* , melebihi tidak hanya level awal, k^* dan y^* tetapi juga level yang lebih tinggi yang disebabkan oleh peningkatan tabungan dan investasi, k^* dan y^* .



Gambar 5.2. Efek Tabungan pada Output

Sektor keuangan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi produksi melalui pemantauan dan pengelolaan proyek investasi yang efektif. Model Solow hanya menangkap efek jangka pendek dan menengah dari peningkatan dalam pengembangan keuangan. Itu tidak menjelaskan kemajuan teknologi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keterbatasan model pertumbuhan Solow memunculkan model pertumbuhan Schumpeterian. Schumpeter berpendapat bahwa sektor keuangan yang berkembang dengan baik mutlak diperlukan. Proyek-proyek baru membutuhkan pembiayaan karena investasi dimuka tidak selalu dapat ditanggung oleh pengusaha itu sendiri. Tanpa sektor keuangan untuk menyalurkan dana, inovasi akan hampir mustahil dan akan ada sedikit pertumbuhan ekonomi permanen. Keadaan inilah inklusi keuangan menjadi sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, karena ini menyediakan produk keuangan inovatif untuk mendorong orang berpenghasilan rendah untuk menabung lebih banyak.

Bagian 6

INKLUSI KEUANGAN DAN KEMISKINAN

Salah satu tujuan dari inklusi keuangan adalah menjadikannya sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, mengurangi kemiskinan, distribusi pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan. Beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan hasil yang berbeda di setiap negara.

Peningkatan akses keuangan di pedesaan Malawi melalui komitmen tabungan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin karena menyediakan akses ke tabungan mereka untuk penggunaan input pertanian. Penelitian yang dilakukan di Kenya, menemukan bahwa dengan memanfaatkan rumah tangga yang kurang mampu, bank umum dapat membantu meningkatkan akses keuangan bagi kaum miskin. Di negara berkembang Asia, ditemukan bahwa inklusi keuangan pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Beberapa negara berkembang dilaporkan bahwa inklusi keuangan adalah alat yang layak untuk memerangi kemiskinan dan distribusi pendapatan, peningkatan akses ke layanan keuangan bagi

mereka yang berpenghasilan rendah dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang bekerja.

Dampak inklusi keuangan di Indonesia signifikan pada kemiskinan, tetapi dampaknya lebih jelas di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan karena konsentrasi penyedia layanan keuangan di pusat-pusat kota, namun penelitian oleh Anwar & Amrullah menemukan dampak inklusi keuangan secara tidak langsung mengurangi kemiskinan tetapi meningkatkan ketimpangan pendapatan secara besar-besaran karena bias geografis, gender dan usia dalam inklusi keuangan.

Adanya perluasan cabang-cabang BPR di India telah membantu mengurangi kemiskinan. Serupa dengan Hanohan, adanya akses keuangan yang lebih tinggi secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien Gini.

Bagian 7

HASIL STUDI EMPIRIS

JUDUL:

KEKUATAN MODEL SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION DALAM MENDETEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN BERBASIS INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

ABSTRAK:

Salah satu indikator keberhasilan ekonomi adalah terciptanya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Fenomena permasalahan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perlambatan pertumbuhan PDB Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat guncangan pasar keuangan global, yang pada akhirnya berdampak pada sistem keuangan domestik. Fenomena masalah selanjutnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan sebagai indikator ekonomi adalah rendahnya tingkat inklusi keuangan Indonesia. Di masa Pandemi COVID-19, peningkatan inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah. Urgensi penelitian ini sangat penting dalam membentuk model prediksi jangka pendek dan jangka panjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan berbasis inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan berdasarkan inklusi keuangan yaitu cabang bank umum, tabungan, kredit, dan jumlah ATM di Indonesia dengan menggunakan model SUR (Seemingly Unrelated Regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak berdampak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, inklusi keuangan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melalui hubungan negatif yang signifikan pada variabel kantor cabang bank, tabungan, dan kredit.

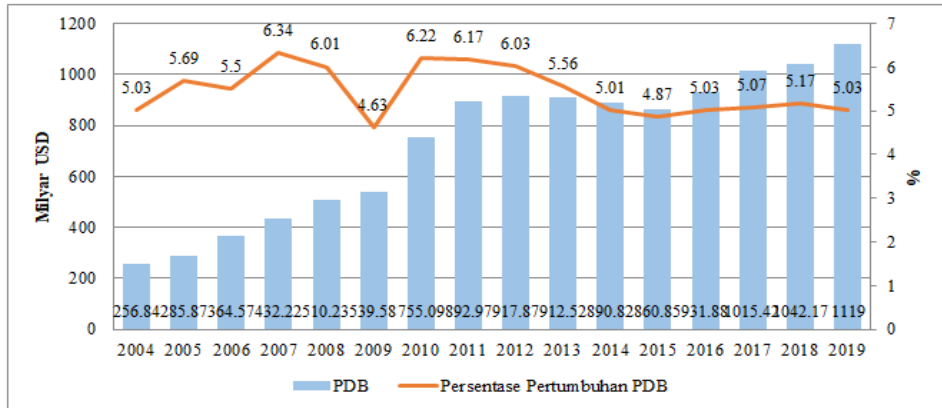
LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menurut data World Bank, perekonomian Indonesia yang diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebesar USD 1.119 milyar atau setara Rp16.395 triliun pada tahun 2019. Jumlah penduduk yang sangat besar serta wilayah yang luas menjadi keunggulan sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam perekonomiannya. Beberapa lembaga internasional bahkan memprediksi Indonesia bakal menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima dunia dalam beberapa tahun mendatang [1].

Tabel 1. PDB dan Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2019

Tahun	PDB (Milyar USD)	Pertumbuhan PDB (%)
2004	256.84	5.03
2005	285.87	5.69
2006	364.57	5.5
2007	432.22	6.34
2008	510.23	6.01
2009	539.58	4.63
2010	755.09	6.22
2011	892.97	6.17
2012	917.87	6.03
2013	912.52	5.56
2014	890.82	5.01
2015	860.85	4.87
2016	931.88	5.03
2017	1015.42	5.07
2018	1042.17	5.17
2019	1119	5.03

Sumber: World Bank Data



Sumber: Tabel 1

Gambar 1. PDB dan Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2019

Fenomena masalah pada tahun 2015 dan 2016, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami perlambatan karena dihadapi tantangan eksternal pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari yang diperkirakan, yang akhirnya berdampak ke jalur perdagangan dan keuangan [2]. Sedangkan tantangan domestik, dikarenakan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas dan dangkalnya pasar keuangan domestik.

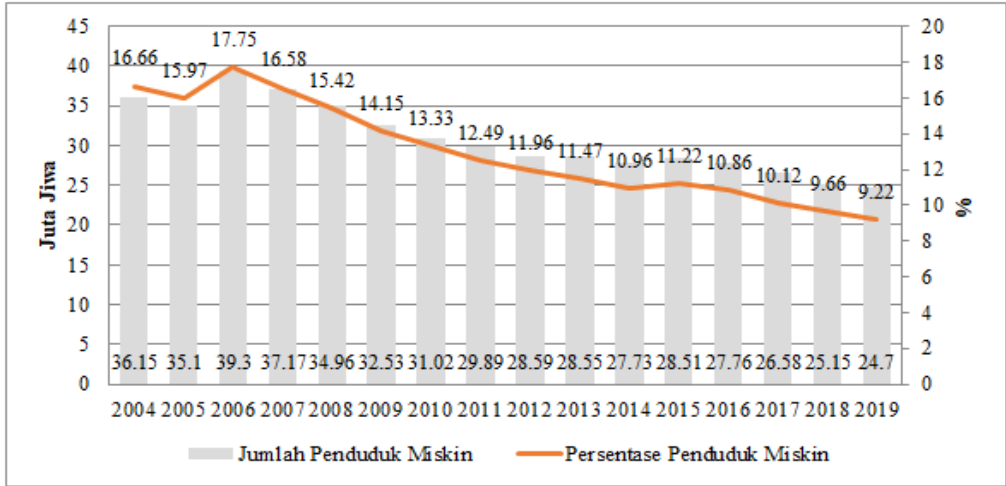
Laporan Bank Dunia menyebutkan, meski perekonomian dunia mengalami kelesuan, kemiskinan ekstrem di dunia terus berkurang. Perbaikan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih banyak didorong oleh kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama Cina, Indonesia, dan India [3]. Sejak tahun 2004 hingga 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan.

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan semakin banyak produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat [4].

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, Tahun 2004 – 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2004	36.15	16.66
2005	35.1	15.97
2006	39.3	17.75
2007	37.17	16.58
2008	34.96	15.42
2009	32.53	14.15
2010	31.02	13.33
2011	29.89	12.49
2012	28.59	11.96
2013	28.55	11.47
2014	27.73	10.96
2015	28.51	11.22
2016	27.76	10.86
2017	26.58	10.12
2018	25.15	9.66
2019	24.7	9.22

Sumber: Badan Pusat Statistik



Sumber: Tabel 2

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, Tahun 2004 – 2019

Hadirnya inklusi keuangan menjadi solusi kebijakan di banyak negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan pada forum internasional seperti G-20 (paling baru pada 2016 di Hangzhou), bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu faktor untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran, namun yang menjadi masalah adalah masih rendahnya indeks inklusi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat indeks inklusi keuangan Indonesia berada dikisaran 76,2%, tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* lainnya [5].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai program untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan

sejalan dengan upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan Pemerintah [6]. Selama pandemi COVID-19, percepatan inklusi keuangan dilakukan dengan penyaluran kredit modal kerja terhadap sektor UMKM agar dapat bergerak di masa pandemi [5]. Anggota dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, juga menjelaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu dalam mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 [6].

Urgensi penelitian ini sangat penting dalam membentuk model prediksi jangka pendek maupun jangka panjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan berbasis inklusi keuangan. Selain itu, belum ditemukan juga perpaduan antara model SUR dan SVAR, dan kedua model tersebut mampu mendeteksi pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia serta interaksinya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

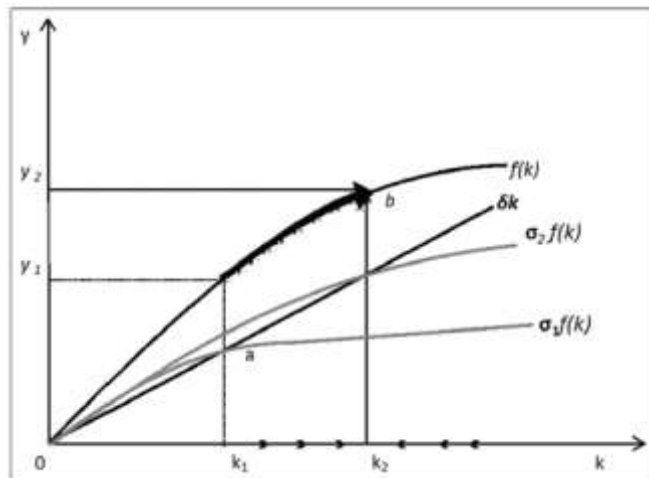
Teori Perkembangan Keuangan-Pertumbuhan Ekonomi

Studi tentang pengembangan keuangan telah mengidentifikasi empat bidang yang berbeda sebagai kekuatan pendorong

pertumbuhan ekonomi. Pertama, adalah penyediaan alat pembayaran yang dapat diandalkan dan berbiaya rendah untuk semua, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kedua, adalah peran intermediasi keuangan dalam meningkatkan volume transaksi dan alokasi sumber daya dari unit surplus ke unit defisit ekonomi dan dalam proses meningkatkan distribusi sumber daya [7]. Ketiga, berkaitan dengan efek manajemen risiko, bahwa sistem keuangan menyediakan dengan mengurangi risiko likuiditas, sehingga memungkinkan pembiayaan investasi dan inovasi yang berisiko tetapi lebih produktif dalam perekonomian [8] [9] dan keempat, sektor keuangan memberikan informasi tentang kemungkinan investasi dan ketersediaan modal dalam sistem, dengan demikian memperbaiki efek informasi asimetris [10].

Dari perspektif fungsi produksi agregat, efek keuangan yang disebutkan di atas berkontribusi signifikan terhadap perubahan input investasi dan tabungan menjadi output yang lebih besar dalam perekonomian, baik melalui saluran akumulasi modal atau saluran perubahan teknologi. Dengan mengambil saluran akumulasi modal sebagai contoh, Babajide, Adegboye, & Omankhanlen dalam penelitiannya, mengadopsi model Odeniran & Udaeja dalam mengembangkan model pertumbuhan Solow. Model tersebut

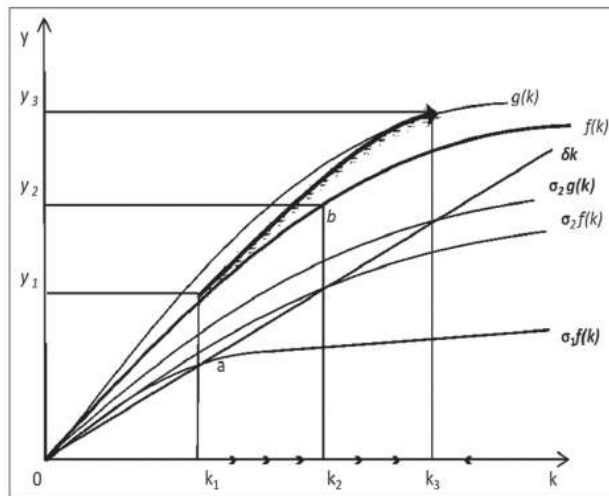
mengasumsikan peningkatan tingkat tabungan, δ , akan meningkatkan tingkat modal (k) dan output per kapita (y). Pergeseran dalam δ , seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 2.5. Pergeseran dari δ_1 ke δ_2 menyebabkan kondisi mapan, k naik dari k^*1 ke k^*2 dan output per kapita naik dari y^*1 ke y^*2 [11].



Gambar 3. Efek Tabungan pada Akumulasi Modal [7]

Analisis ini menyiratkan penghapusan represi keuangan dan pengurangan kegagalan pasar keuangan yang akan meningkatkan kualitas investasi karena hanya proyek dengan pengembalian lebih besar dari tingkat bunga (IR) yang akan didanai. Dengan demikian, seluruh fungsi produksi akan bergeser ke atas, dari $f(k)$ ke $g(k)$. Peningkatan efisiensi ekonomi akan semakin meningkatkan penghematan karena $\delta_2 g(k) > \delta_2 f(k)$, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. Ini dapat dilihat dari Gambar 2 bahwa tingkat

steady-state baru dari persediaan modal per-pekerja dan output per-pekerja, k^3 dan y^3 , melebihi tidak hanya level awal, k^1 dan y^1 tetapi juga level yang lebih tinggi yang disebabkan oleh peningkatan tabungan dan investasi, k^2 dan y^2 .



Gambar 4. Efek Tabungan pada Output [7]

Sektor keuangan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi produksi melalui pemantauan dan pengelolaan proyek investasi yang efektif. Model Solow hanya menangkap efek jangka pendek dan menengah dari peningkatan dalam pengembangan keuangan. Itu tidak menjelaskan kemajuan teknologi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keterbatasan model pertumbuhan Solow memunculkan model pertumbuhan Schumpeterian. Schumpeter berpendapat bahwa sektor keuangan

yang berkembang dengan baik mutlak diperlukan. Proyek-proyek baru membutuhkan pembiayaan karena investasi dimuka tidak selalu dapat ditanggung oleh pengusaha itu sendiri. Tanpa sektor keuangan untuk menyalurkan dana, inovasi akan hampir mustahil dan akan ada sedikit pertumbuhan ekonomi permanen. Keadaan inilah inklusi keuangan menjadi sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, karena ini menyediakan produk keuangan inovatif untuk mendorong orang berpenghasilan rendah untuk menabung lebih banyak [7].

Inklusi Keuangan dan Kemiskinan

Salah satu tujuan dari inklusi keuangan adalah menjadikannya sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, mengurangi kemiskinan, distribusi pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan [12]. Beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan hasil yang berbeda disetiap negara.

Peningkatan akses keuangan di pedesaan Malawi melalui komitmen tabungan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin karena menyediakan akses ke tabungan mereka untuk penggunaan input pertanian [13]. Penelitian yang dilakukan di Kenya, menemukan bahwa dengan memanfaatkan rumah tangga yang kurang mampu, bank umum dapat membantu meningkatkan akses keuangan bagi kaum miskin [14]. Di negara berkembang Asia,

ditemukan bahwa inklusi keuangan pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan [15].

Beberapa negara berkembang dilaporkan bahwa inklusi keuangan adalah alat yang layak untuk memerangi kemiskinan dan distribusi pendapatan [16], peningkatan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang berpenghasilan rendah dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang bekerja [17].

Dampak inklusi keuangan di Indonesia signifikan pada kemiskinan, tetapi dampaknya lebih jelas di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan karena konsentrasi penyedia layanan keuangan di pusat-pusat kota [18], namun penelitian oleh Anwar & Amrullah menemukan dampak inklusi keuangan secara tidak langsung mengurangi kemiskinan tetapi meningkatkan ketimpangan pendapatan secara besar-besaran karena bias geografis, gender dan usia dalam inklusi keuangan [19].

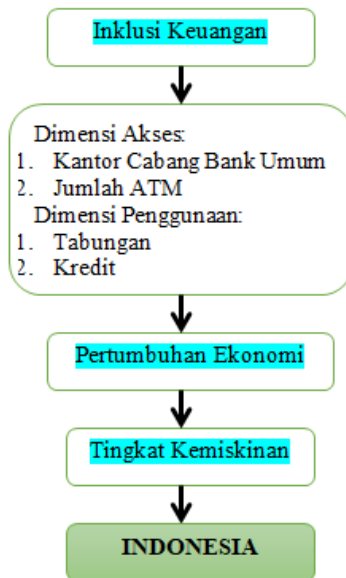
Adanya perluasan cabang-cabang BPR di India telah membantu mengurangi kemiskinan [20]. Serupa dengan Hanohan, adanya akses keuangan yang lebih tinggi secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien Gini [21].

Dimensi Inklusi Keuangan

Beberapa studi literatur meneliti inklusi keuangan dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut mengacu pada tiga dimensi inklusi keuangan, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan. Dimensi akses berkaitan dengan jangkauan terhadap layanan jasa keuangan yang tergambar melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*), kantor cabang bank, dimensi penggunaan berkaitan dengan penggunaan produk keuangan seperti jumlah tabungan, kredit, jumlah deposan, dan peminjam [22], sedangkan dimensi kualitas berkaitan dengan ketersediaan produk keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kerangka Pemikiran

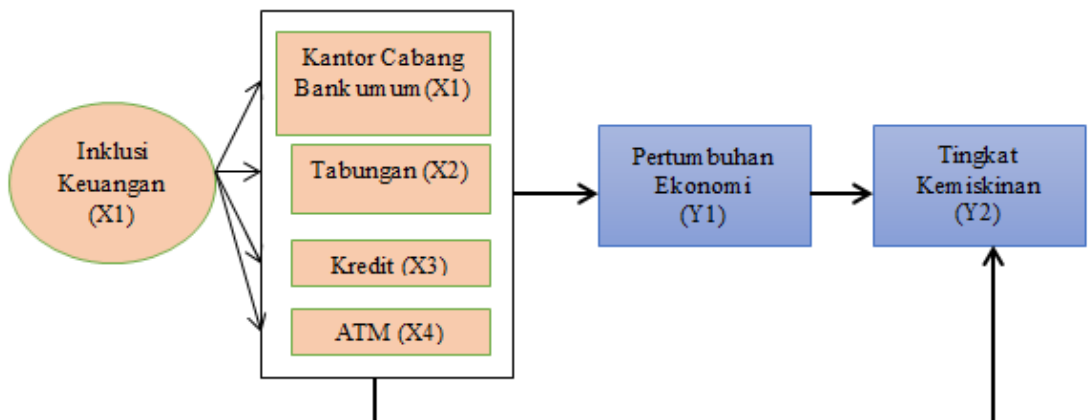
Mengacu pada penelitian terdahulu dan teori yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5. Kerangka Berfikir

Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual SUR



Gambar 6. Kerangka Konseptual SUR

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Inklusi keuangan melalui kantor cabang bank umum, tabungan, kredit, dan jumlah ATM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model SUR (*Seemingly Unrelated Regression*). Dengan pendekatan penelitian tersebut mampu menjelaskan tentang deteksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan berbasis inklusi keuangan di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini berjenis data sekunder yang bersumber dari data *time series* tahun 2004-2019. Data diperoleh dari berbagai sumber yaitu World Bank, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Adapun pengolahan data menggunakan software Eviews 10.

Teknik Analisis Data

Model *Seemingly Unrelated Regression* (SUR)

Model *Seemingly Unrelated Regression* (SUR) merupakan perluasan dari analisis regresi linear yang berupa sistem persamaan yang terdiri dari beberapa persamaan regresi yang saling berhubungan karena galat saling berkorelasi secara *contemporaneous*. Korelasi galat *contemporaneous* terjadi apabila pada unit waktu yang sama, galat pada persamaan yang berbeda berkorelasi [23].

Model SUR digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan berbasis inklusi keuangan di Indonesia. Persamaan model SUR dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{1t-p} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t-p} + \alpha_2 X_{2t-p} + \alpha_3 X_{3t-p} + \alpha_4 X_{4t-p} + e_1 \quad (1)$$

$$Y_{2t-p} = \beta_0 + \beta_1 X_{1t-p} + \beta_2 X_{2t-p} + \beta_3 X_{3t-p} + \beta_4 X_{4t-p} + e_2 \quad (2)$$

$$Y_{2t-p} = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1t-p} + \gamma_2 X_{2t-p} + \gamma_3 X_{3t-p} + \gamma_4 X_{4t-p} + \gamma_5 Y_{1t-p} + e_3 \quad (3)$$

Keterangan:

- Y_1 = Pertumbuhan ekonomi (%)
- Y_2 = Tingkat kemiskinan (%)
- X_1 = Kantor cabang bank umum (per 100.000 orang dewasa)
- X_2 = Tabungan (Milyar USD)
- X_3 = Kredit yang disalurkan (% dari PDB)
- X_4 = Jumlah ATM (per 100.000 orang dewasa)
- t = Banyaknya waktu (15 tahun, 2004 – 2019)
- p = Panjang *lag* optimal
- e = Galat

HASIL PENELITIAN

Kondisi Ekonomi Indonesia Selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang diawali pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu ditandai dengan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, telah memicu krisis ekonomi yang parah di negara berkembang Asia termasuk Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia secara global tahun 2020 diperkirakan jatuh seperti depresi tahun 1930 [1]. Adanya kemungkinan wabah baru dan penundaan peluncuran vaksin, tekanan keuangan yang meningkat yang diperburuk oleh tingkat hutang yang meningkat, serta kemungkinan efek yang lebih parah, termasuk ketidakpastian kebijakan yang terus-menerus menjadi faktor penurunan potensi pertumbuhan ekonomi [2]. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menjadi 4%.

Tabel 8. Pertumbuhan PDB Riil di Negara ASEAN-5, 2019-21 (%)

ASEAN-5	2019	2020	2021
Filipina	6.0	-9.0	5.9
Indonesia	5.0	-2.07	4.0
Vietnam	7.0	2.6	7.0
Malaysia	4.3	-5.2	7.0
Thailand	2.4	-6.4	4.5

Sumber: OECD Development Center

Pemerintah Indonesia merespon pandemi COVID-19 dengan mengambil langkah-langkah *extraordinary*, yaitu memberikan stimulus ekonomi dan keuangan. Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) diarahkan untuk menangani dampak kesehatan serta memulihkan perekonomian nasional secara cepat dan responsif [3].

Perkembangan Variabel Penelitian

Adapun perkembangan variabel-variabel penelitian yaitu Kantor Cabang Bank Umum, Tabungan, Kredit, ATM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan periode 2004 hingga 2019 akan dijabarkan sebagai berikut :

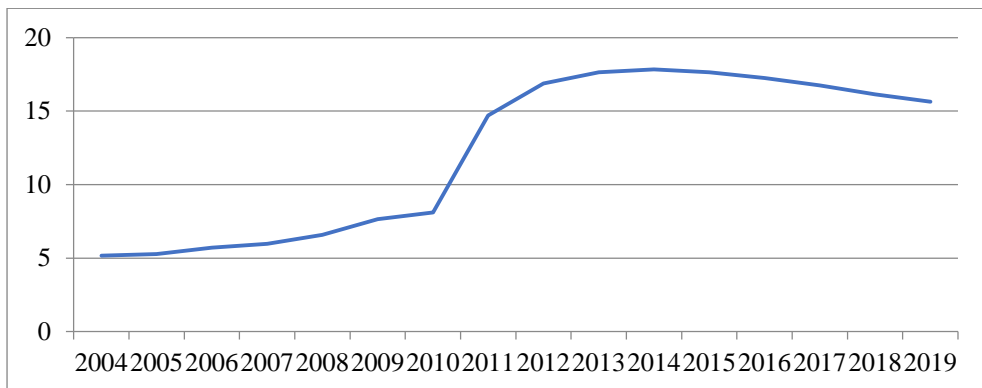
Perkembangan Kantor Cabang Bank Umum di Indonesia

Tabel 9. Perkembangan Kantor Cabang Bank Umum di Indonesia

TAHUN	Kantor Cabang Bank Umum (per 100.000 orang dewasa)
2004	5.16
2005	5.27
2006	5.72
2007	5.97
2008	6.58
2009	7.64
2010	8.11
2011	14.71
2012	16.87
2013	17.64
2014	17.83

2015	17.64
2016	17.26
2017	16.75
2018	16.14
2019	15.64

Sumber: World Bank Data



Sumber: Tabel 9

Gambar 12. Grafik Perkembangan Kantor Cabang Bank Umum di Indonesia

Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa terjadi lonjakan peningkatan jumlah kantor cabang bank yang cukup drastis tahun 2011-2014, namun mulai tahun 2015 hingga 2019 kecenderungan jumlah kantor cabang bank terlihat semakin menurun. Data terakhir pada tahun 2019 yaitu sebesar 15,64.

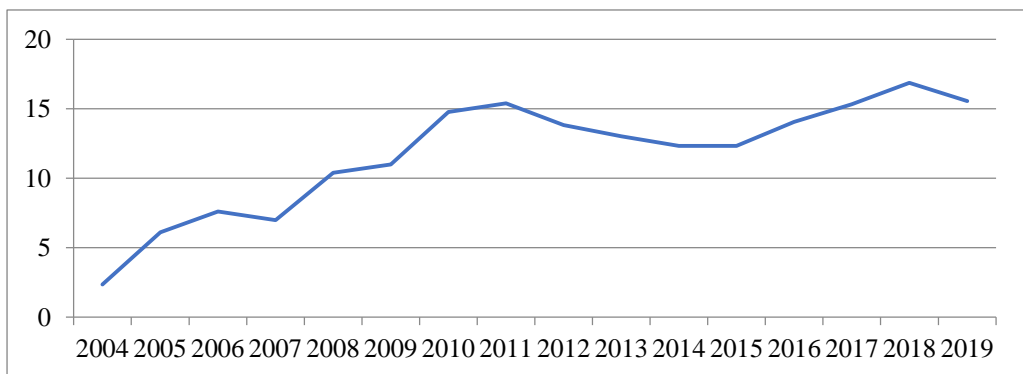
Perkembangan Tabungan di Indonesia

Tabel 10. Perkembangan Tabungan di Indonesia

TAHUN	Tabungan Nasional Bersih (% dari GNI)
2004	2.344
2005	6.097
2006	7.595

2007	6.986
2008	10.387
2009	10.986
2010	14.77
2011	15.382
2012	13.833
2013	13.006
2014	12.316
2015	12.324
2016	14.05
2017	15.32
2018	16.861
2019	15.539

Sumber: World Bank Data



Sumber: Tabel 10

Gambar 13. Grafik Perkembangan Tabungan di Indonesia

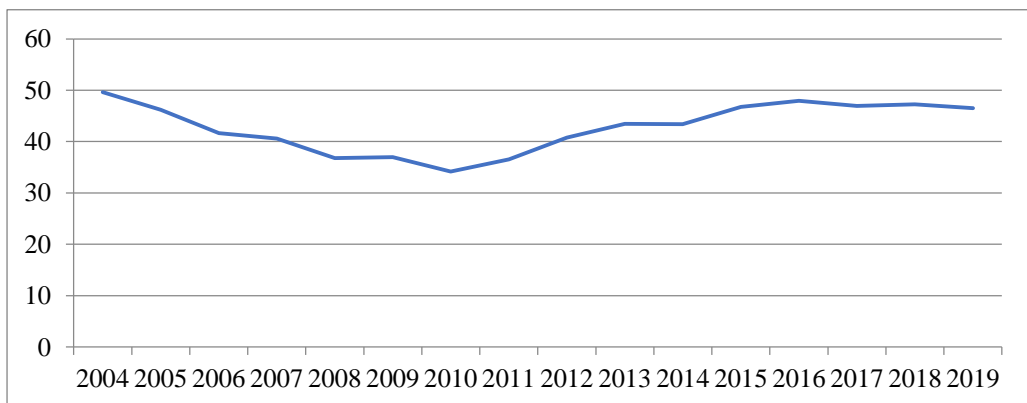
Perkembangan tabungan di Indonesia secara grafik mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan 2019, meskipun sempat terjadi fluktuasi penurunan pada tahun 2007, 2012, 2014, 2015, dan 2019.

Perkembangan Kredit di Indonesia

Tabel 11. Perkembangan Kredit di Indonesia

TAHUN	Kredit Domestik Sektor Keuangan (% PDB)
2004	49.623
2005	46.204
2006	41.659
2007	40.58
2008	36.77
2009	36.966
2010	34.182
2011	36.55
2012	40.768
2013	43.429
2014	43.424
2015	46.774
2016	47.956
2017	46.964
2018	47.232
2019	46.515

Sumber: World Bank Data



Sumber: Tabel 11

Gambar 14. Grafik Perkembangan Kredit di Indonesia

Perkembangan kredit domestik sempat mengalami penurunan pada tahun 2004 hingga 2010, namun kembali melonjak di tahun

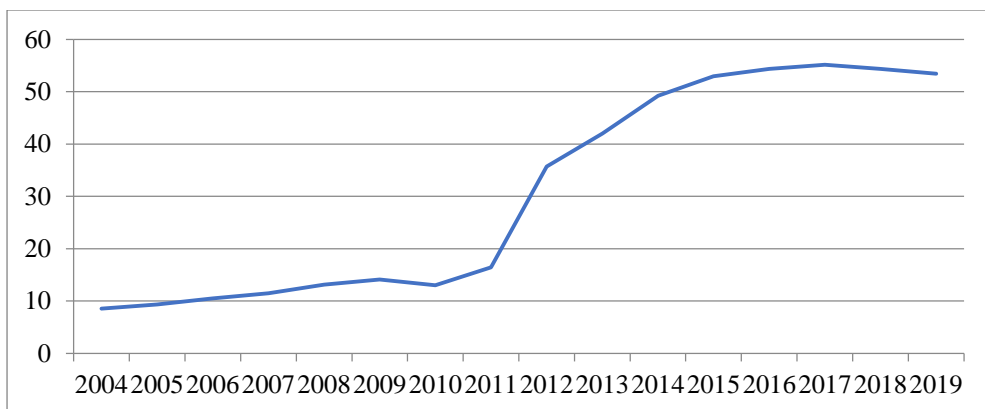
2011 hingga 2016. Pada tahun 2019 jumlah kredit domestik Indonesia sebesar 46.515%, turun sebesar 0,717% dari tahun 2018.

Perkembangan ATM di Indonesia

Tabel 12. Perkembangan ATM di Indonesia

TAHUN	Jumlah ATM (per 100.000 orang dewasa)
2004	8.56
2005	9.32
2006	10.49
2007	11.46
2008	13.11
2009	14.12
2010	13.04
2011	16.45
2012	35.73
2013	42.02
2014	49.21
2015	52.97
2016	54.34
2017	55.14
2018	54.38
2019	53.41

Sumber: World Bank Data



Sumber: Tabel 12

Gambar 15. Grafik Perkembangan ATM di Indonesia

Tren perkembangan jumlah ATM di Indonesia hampir sama seperti perkembangan jumlah kantor cabang bank umum. Mengalami lonjakan yang cukup drastis di sepanjang tahun 2012 hingga 2017, namun mengalami penurunan hingga tahun 2019.

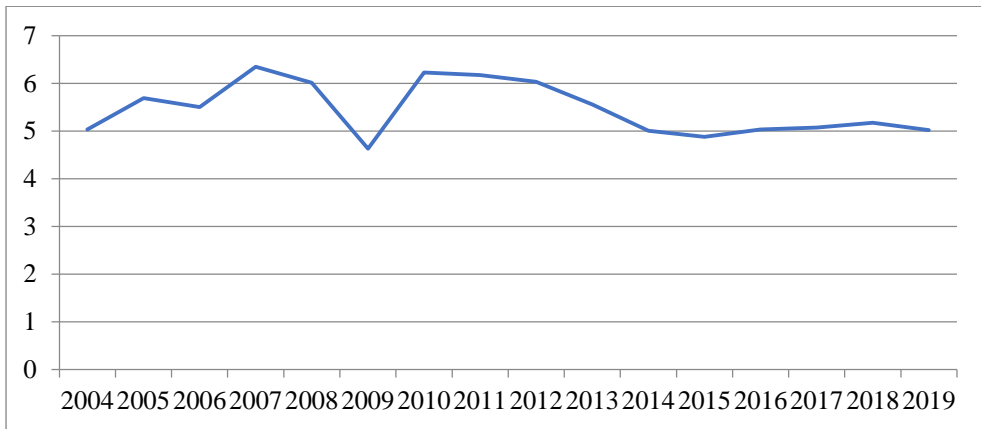
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Tabel 13. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

TAHUN	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004	5.031
2005	5.693
2006	5.501
2007	6.345
2008	6.014
2009	4.629
2010	6.224
2011	6.17
2012	6.03
2013	5.557
2014	5.007

2015	4.876
2016	5.033
2017	5.07
2018	5.174
2019	5.018

Sumber: World Bank Data



Sumber: Tabel 13

Gambar 16. Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

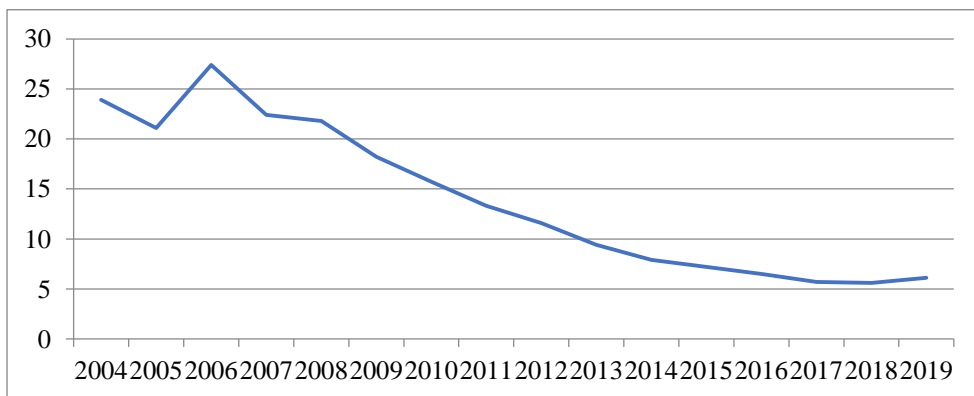
Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan di sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2019. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 4,62% sebagai akibat dari krisis global yang melanda Amerika Serikat tahun 2008.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Tabel 14. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

TAHUN	Tingkat Kemiskinan (%)
2004	23.9
2005	21.1
2006	27.4
2007	22.4
2008	21.8
2009	18.2
2010	15.7
2011	13.3
2012	11.6
2013	9.4
2014	7.9
2015	7.2
2016	6.5
2017	5.7
2018	5.6
2019	6.1

Sumber: BI dan BPS



Sumber: Tabel 14

Gambar 17. Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia fluktuatif selama tahun 2004 hingga 2008. Selanjutnya tren tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Akan tetapi, pada tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 (dari 5,6% menjadi 6,1%).

Hasil Model *Seemingly Unrelated Regression (SUR)*

Model SUR terdiri dari beberapa sistem persamaan yang tidak berhubungan (*unrelated*). Adapun hasil analisis SUR dengan estimasi FGLS prosedur System persamaan I yaitu Y1 pertumbuhan ekonomi dan persamaan II yaitu Y2 tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil SUR I

	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C(11)	5.557114	2.487531	0.0213
C(12)	0.052346	1.022789	0.3180
C(13)	0.048736	0.799018	0.4332
C(14)	-0.006743	-0.145146	0.8860
C(15)	-0.032962	-1.699188	0.1041
C(21)	37.73778	3.594226	0.0017
C(22)	-0.487159	-2.310611	0.0311
C(23)	-0.766385	-3.087204	0.0056
C(24)	-0.230669	-1.243303	0.2275
C(25)	-0.085340	-1.014515	0.3219
C(26)	0.677154	0.678663	0.5048
Determinant residual covariance	0.358882		
Equation: Y1=C(11)+C(12)*X1+C(13)*X2+C(14)*X3+C(15)*X4			
R-squared	0.477986		
Equation: Y2=C(21)+C(22)*X1+C(23)*X2+C(24)*X3+C(25)*X4+C(26)*Y1			
R-squared	0.954935		

Sumber: Lampiran 1

Tabel 15 memperlihatkan untuk hasil SUR persamaan pertama, baik X1, X2, X3, maupun X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y1 pada $\alpha = 5\%$. Kantor cabang bank umum dan tabungan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Kredit dan ATM berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga tidak signifikan. Sedangkan hasil SUR persamaan kedua, hanya X1 dan X2 yang signifikan mempengaruhi Y2 pada $\alpha = 5\%$. Nilai koefisien X1 sebesar -0,48 berarti jika jumlah kantor cabang bank meningkat sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,48%. Nilai koefisien X2 sebesar -0,766 memberi arti jika tabungan meningkat 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 0,766%.

Ukuran kebaikan model pada persamaan pertama yang dilihat melalui R-square yaitu 0,477 atau sebesar 47,7%, sedangkan ukuran kebaikan model persamaan kedua yaitu 0,954 atau sebesar 95,4%.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan software Eviews 10 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Cholesky Normality Test

	Chi-sq	df	Prob
Skewness	12.87391	2	0.0016
Kurtosis	19.09639	2	0.0001

Sumber: Lampiran 2

Hasil *Cholesky Normality Test* menunjukkan baik pada nilai chi-sq skewness maupun kurtosis, nilai probability lebih kecil dari 0,05. Ini artinya sisaan **tidak menyebar secara normal**. Oleh karena itu masalah ini akan diatasi dengan mengubah data variabel penelitian menjadi logaritma natural.

Hasil Model *Seemingly Unrelated Regression (SUR)* Menggunakan Logaritma Natural

Tabel 17. Hasil SUR II

	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C(11)	1.767601	1.184009	0.2496
C(12)	0.134197	1.057341	0.3024
C(13)	0.091928	0.886166	0.3856
C(14)	-0.004730	-0.011978	0.9906
C(15)	-0.187061	-1.549987	0.1361
C(21)	10.37200	4.185854	0.0004
C(22)	-0.249550	-1.194412	0.2456
C(23)	-0.445015	-2.631642	0.0156
C(24)	-1.637957	-2.606524	0.0165
C(25)	-0.231715	-1.124890	0.2733
C(26)	0.384850	0.967254	0.3444
Determinant residual covariance	7.14E-05		
Equation: LOGY1=C(11)+C(12)*LOGX1+C(13)*LOGX2+C(14)*LOGX3+C(15)*LOGX4			
R-squared	0.441084		
Equation: LOGY2=C(31)+C(32)*LOGX1+C(33)*LOGX2+C(34)*LOGX3+C(35)*LOGX4+C(36)*LOGY1			
R-squared	0.956449		

Sumber: Lampiran 3

Tabel 17 memperlihatkan untuk hasil SUR persamaan pertama, baik X1, X2, X3, maupun X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y1 pada $\alpha = 5\%$. Kantor cabang bank umum dan tabungan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Kredit dan ATM berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga tidak signifikan. Hasil ini sama seperti hasil SUR sebelumnya. Sedangkan hasil SUR persamaan kedua, X1, X2, dan X3 signifikan mempengaruhi Y2 pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien masing-masing sebesar -0,249, -0,445, dan -1,637. Ini berarti, semakin meningkat jumlah kantor cabang bank, akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Begitupun dengan tabungan dan kredit, semakin tinggi tabungan dan semakin tinggi kredit yang disalurkan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Ukuran kebaikan model pada persamaan pertama yang dilihat melalui R-square yaitu 0,441 atau sebesar 44,1%, sedangkan ukuran kebaikan model persamaan kedua yaitu 0,956 atau sebesar 95,6%.

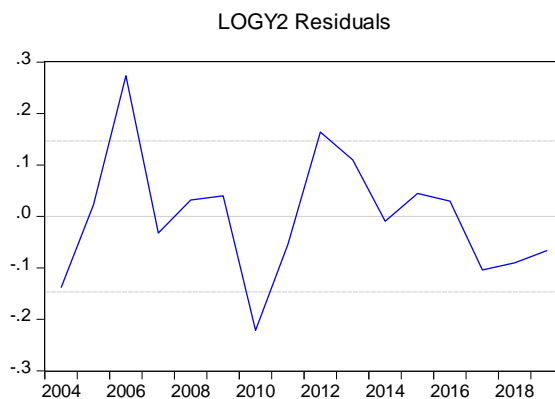
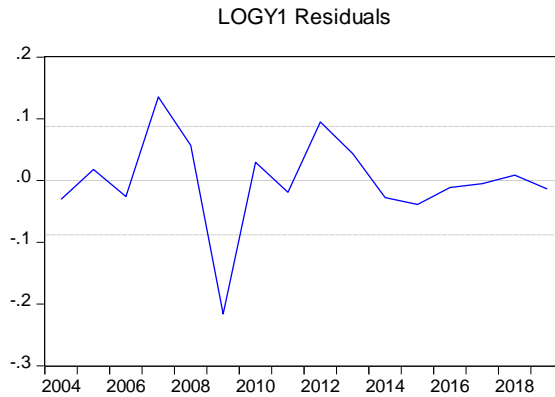
Uji Normalitas Menggunakan Logaritma Natural

Tabel 18. Cholesky Normality Test

	Chi-sq	df	Prob
Skewness	3.493567	2	0.1743
Kurtosis	5.271585	2	0.0717

Sumber: Lampiran 4

Hasil *Cholesky Normality Test* menunjukkan baik pada nilai chi-sq skewness maupun kurtosis, nilai probability lebih besar dari 0,05. Ini artinya sisaan sudah **menyebar secara normal**.



Sumber: Lampiran 5

Gambar 18. Grafik Residual Y1 dan Y2

Kecenderungan nilai residu baik Y1 maupun Y2 berfluktuatif pada posisi positif maupun negatif tanpa membentuk pola yang sama. Ini artinya ragam sisaan masing-masing persamaan sudah terbebas dari masalah heterokedastisitas.

PEMBAHASAN

Hasil model SUR pada persamaan pertama menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak terlalu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil ini bertentangan dengan teori, dan sejalan dengan penelitian (Mwaitete & George, 2018) dan (Iqbal & Sami, 2017).

Sebaliknya, hasil model SUR pada persamaan kedua menunjukkan bahwa inklusi keuangan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia melalui hubungannya yang negatif signifikan pada variabel kantor cabang bank, tabungan, dan kredit. Ini sejalan dengan penelitian (Kusuma & Indrajaya, 2020), (Williams, Adegoke, & Dare, 2017) (Burgess & Pande, 2005) (Brune, Gine, Goldberg, & Yang, 2011).

Inklusi keuangan akan menciptakan budaya menabung, mengambil pinjaman tidak lagi ke rentenir melainkan ke lembaga keuangan, untuk itu penyediaan akses layanan keuangan sangat

penting dan dapat berpotensi untuk menarik masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti pernyataan Presiden Kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim bahwa akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (Pasopati, 2015). Temuan hubungan negatif signifikan antara kredit dan tingkat kemiskinan sejalan dengan (Bakari, et al., 2019), dan didukung oleh hasil penelitian (Abimbola, Olokoyo, Babalola, & Farouk, 2018) dan (Coulibaly & Yogo, 2016). Tentunya hal ini semakin menguatkan bahwa penyaluran kredit yang tepat guna dan tepat sasaran memegang peranan penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

REKOMENDASI

Implikasi kebijakan yang direkomendasikan bagi pemangku kepentingan di Indonesia agar lebih mengoptimalkan persebaran dan pemerataan inklusi keuangan diseluruh wilayah Indonesia baik perkotaan maupun pedesaan. Jika masyarakat di perkotaan sudah dapat mengakses maupun menggunakan layanan keuangan formal, maka di pedesaan cenderung belum semua melakukannya. Untuk itu, pemerintah maupun lembaga terkait lebih gencar mensosialisasikan tentang literasi keuangan karena literasi keuangan merupakan langkah awal masyarakat untuk mengenal inklusi keuangan, guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimbola, A., Olokoyo, F., Babalola, O., & Farouk, E. (2018). Financial Inclusion as a Catalyst for Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(6), EM-2018-481-490.
- Allen, F., Carletti, E., Cull, R., Qian, J., Senbet, L., & Valenzuela, P. (2012, April). RESOLVING THE AFRICAN FINANCIAL DEVELOPMENT GAP: Cross-Country Comparisons and a Within-Country Study of Kenya. *NBER Working Paper Series 18013*.
- Anwar, A. I., & Amrullah, A. (2017, November). Impact of Financial Inclusion towards Poverty in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 40.
- Babajide, A. A., Adegboye, F. B., & Omarkhanlen, A. E. (2015). Financial Inclusion and Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 629-637.
- Bakari, P. I., Donga, P. M., Idi, A., Hedima, J. E., Wilson, K., Babayo, H., et al. (2019, January). An Examination of the Impact of Financial Inclusion on Poverty Reduction: An Empirical Evidence from Sub-Saharan Africa. *International Journal of Scientific and Research Publication*, 9(1), 239-252.
- Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial Intermediation and Endogenous Growth. *Review of Economic Studies*, 58, 195-209.
- Britanica.com. <https://www.britannica.com/topic/economic-growth>.
- Brune, L., Gine, X., Goldberg, J., & Yang, D. (2011, August). Commitments to Save: A Field Experiment in Rural Malawi. *World Bank Policy Research Working Paper No. 5748*.
- Burgess, R., & Pande, R. (2005, February). DO RURAL BANKS MATTER? EVIDENCE FROM THE INDIAN SOCIAL BANKING EXPERIMENT. *American Economic Review*, 95(3), 780-795.

- Coulibaly, A., & Yogo, U. T. (2016, November). Access to Financial Services and Working Poverty in Developing Countries. *Études et Documents n° 20*.
- Dwiningsih, E. (2012). Model Seemingly Unrelated Regression (SUR). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fadun, S. O. (2014, May). Financial Inclusion, Tool for Poverty Alleviation and Income Redistribution in Developing Countries: Evidences from Nigeria . *Academic Research International*, 5(3), 137-146.
- Gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pertumbuhan-ekonomi/>. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Ciri-Ciri, Faktor dan Metode Pengukurannya.
- Greenwood, J., & Bencivenga, J. (1990). Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. *J. Polit. Econ.*
- Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990, October). Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. *The Journal of Political Economy*, 98(5 Pt. 1), 1076-1107.
- Gunarsih, T., Sayekti, F., & Dewanti, R. L. (2018). FINANCIAL INCLUSION AND POVERTY ALLEVIATION: EVIDENCE FROM INDONESIA. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(3), 468-480.
- Honohan, P. (2008, November). Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking & Finance*, 32(11), 2493-2500.
- Indonesia, B. (2016). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta.
- Indonesia, B. (2019). *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*. Jakarta.
- Indonesia, M. (2020). Inklusi Keuangan Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi. *E-paper Media Indonesia*.
- Iqbal, B. A., & Sami, S. (2017). Role of Banks in Financial Inclusion in India. *Contaduria y Administracion*, 62(2017), 644-656.
- jabarprov.go.id. (2020). <https://jabarprov.go.id/index.php/news/39534/2020/10/06/OJK->

Dorong-Inklusi-Kuangan-untuk-Pemulihan-Ekonomi-Dimasa-AKB.
Retrieved 2020, from Website Resmi Pemerintah Jawa Barat.

- Kemenkeu.go.id. (2021).
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-kondisi-ekonomi-indonesia-kepada-us-asean-business-council/>.
Menkeu Jelaskan Kondisi Ekonomi Indonesia kepada US ASEAN Business Council.
- Kusnandar, V. (2019). *https://databoks.katadata.co.id*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/ekonomi-indonesia-terbesar-di-kawasan-asean?Utm=viva43v3r>.
- Kusuma, A. A., & Indrajaya, I. G. (2020). ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI. *E-Jurnal EP Unud*, 9(5), 993 - 1022.
- Levine, R. (2004, September). Finance and Growth: Theory and Evidence. *The National Bureau of Economic Research - Working Paper Series*, 10766, 1-116.
- Malaysia, B. N. (2018). <https://www.bnm.gov.my>. Retrieved 2020, from <https://www.bnm.gov.my>.
- Mwaitete, C. P., & George, L. A. (2018). Financial Inclusion and Economic Growth A Regression Analysis. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, 4(1), 265-288.
- Nugroho, D et al. (2020). LEADING INDICATORS OF POVERTY IN INDONESIA: APPLICATION IN THE SHORT-TERM OUTLOOK. Working Paper: 49-2020. TPN2K.
- O., S. O., & Udaaja, PhD, E. (2010). Financial Sector Development and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria. *Econ. Finance Rev*, 48(3), 91-124.
- Park, C.-Y., & Mercado, Jr., R. V. (2015, January). Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series*, 426, 1-18.

- Pasopati, G. (2015). *CNN Indonesia*. Retrieved 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150417121926-78-47389/bank-dunia-2-miliar-orang-tidak-memiliki-rekening-bank?>
- R., L. (2004). *Finance and Growth: The Theory and Evidence. NBER Work Paper 10766*.
- Samson O. Odeniran, P., & Udejaja, PhD, E. A. (2010, September). Financial Sector Development and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria. *Economic and Financial Review*, 48(3), 91-124.
- Soetiono, K. S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- UI, LPEM FEB. (2021). *Indonesia Economic Outlook Q3-2021*. <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2021/08/IEO-Q3-2021-EN.pdf>
- V.R., B., & B. D., S. (1991). Financial intermediation and endogenous growth. *Rev. Econ. Study*.
- Williams, H. T., Adegoke, A. J., & Dare, A. (2017, May). Role of Financial Inclusion in Economic Growth and Poverty Reduction in A Developing Economy. *International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)*, 7(5), 265-271.
- Zia, I. Z., & Prasetyo, P. E. (2018). Analysis of Financial Inclusion Toward Poverty and Income Inequality. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 114-125.

LAMPIRAN

Output Eviews

System: SUR

Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression

Date: 09/14/21 Time: 18:09

Sample: 2004 2019

Included observations: 16

Total system (balanced) observations 32

Linear estimation after one-step weighting matrix

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(11)	5.557114	2.233988	2.487531	0.0213
C(12)	0.052346	0.051180	1.022789	0.3180
C(13)	0.048736	0.060995	0.799018	0.4332
C(14)	-0.006743	0.046455	-0.145146	0.8860
C(15)	-0.032962	0.019399	-1.699188	0.1041
C(31)	37.73778	10.49956	3.594226	0.0017
C(32)	-0.487159	0.210836	-2.310611	0.0311
C(33)	-0.766385	0.248246	-3.087204	0.0056
C(34)	-0.230669	0.185529	-1.243303	0.2275
C(35)	-0.085340	0.084119	-1.014515	0.3219
C(36)	0.677154	0.997776	0.678663	0.5048

Determinant residual covariance	0.358882
---------------------------------	----------

Equation: $Y1=C(11)+C(12)*X1+C(13)*X2+C(14)*X3+C(15)*X4$

Observations: 16

R-squared	0.477986	Mean dependent var	5.460750
Adjusted R-squared	0.288163	S.D. dependent var	0.553815
S.E. of regression	0.467256	Sum squared resid	2.401611
Durbin-Watson stat	2.364033		

Equation: $Y2=C(31)+C(32)*X1+C(33)*X2+C(34)*X3+C(35)*X4+C(36)*Y1$

Observations: 16

R-squared	0.954935	Mean dependent var	13.98750
Adjusted R-squared	0.932402	S.D. dependent var	7.522754
S.E. of regression	1.955889	Sum squared resid	38.25502
Durbin-Watson stat	2.650207		

System Residual Normality Tests
 Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
 Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
 Date: 09/14/21 Time: 18:10
 Sample: 2004 2019
 Included observations: 16

Component	Skewness	Chi-sq	df	Prob.
1	-1.051266	2.947094	1	0.0860
2	1.929393	9.926820	1	0.0016
Joint		12.87391	2	0.0016

Component	Kurtosis	Chi-sq	df	Prob.
1	5.992665	5.970696	1	0.0145
2	7.437177	13.12569	1	0.0003
Joint		19.09639	2	0.0001

Component	Jarque-Bera	df	Prob.
1	8.917790	2	0.0116
2	23.05251	2	0.0000
Joint	31.97030	4	0.0000

System: SUR1
 Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression
 Date: 09/14/21 Time: 18:06
 Sample: 2004 2019
 Included observations: 16
 Total system (balanced) observations 32
 Linear estimation after one-step weighting matrix

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(11)	1.767601	1.492894	1.184009	0.2496
C(12)	0.134197	0.126919	1.057341	0.3024
C(13)	0.091928	0.103737	0.886166	0.3856
C(14)	-0.004730	0.394846	-0.011978	0.9906
C(15)	-0.187061	0.120685	-1.549987	0.1361
C(31)	10.37200	2.477868	4.185854	0.0004
C(32)	-0.249550	0.208932	-1.194412	0.2456
C(33)	-0.445015	0.169102	-2.631642	0.0156
C(34)	-1.637957	0.628407	-2.606524	0.0165
C(35)	-0.231715	0.205989	-1.124890	0.2733
C(36)	0.384850	0.397879	0.967254	0.3444

Determinant residual covariance 7.14E-05

$$\text{Equation: } \text{LOGY1} = \text{C}(11) + \text{C}(12) * \text{LOGX1} + \text{C}(13) * \text{LOGX2} + \text{C}(14) * \text{LOGX3} + \text{C}(15) * \text{LOGX4}$$

Observations: 16

R-squared	0.441084	Mean dependent var	1.692812
Adjusted R-squared	0.237842	S.D. dependent var	0.100674
S.E. of regression	0.087890	Sum squared resid	0.084972
Durbin-Watson stat	2.305526		

$$\text{Equation: } \text{LOGY2} = \text{C}(31) + \text{C}(32) * \text{LOGX1} + \text{C}(33) * \text{LOGX2} + \text{C}(34) * \text{LOGX3} + \text{C}(35) * \text{LOGX4} + \text{C}(36) * \text{LOGY1}$$

Observations: 16

R-squared	0.956449	Mean dependent var	2.490218
Adjusted R-squared	0.934673	S.D. dependent var	0.573988
S.E. of regression	0.146706	Sum squared resid	0.215227
Durbin-Watson stat	1.714898		

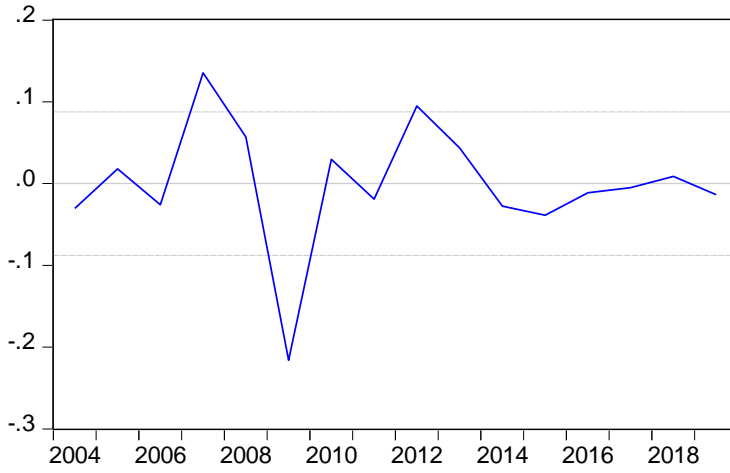
System Residual Normality Tests
 Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
 Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
 Date: 09/14/21 Time: 18:07
 Sample: 2004 2019
 Included observations: 16

Component	Skewness	Chi-sq	df	Prob.
1	-1.065082	3.025068	1	0.0820
2	0.419150	0.468498	1	0.4937
Joint		3.493567	2	0.1743

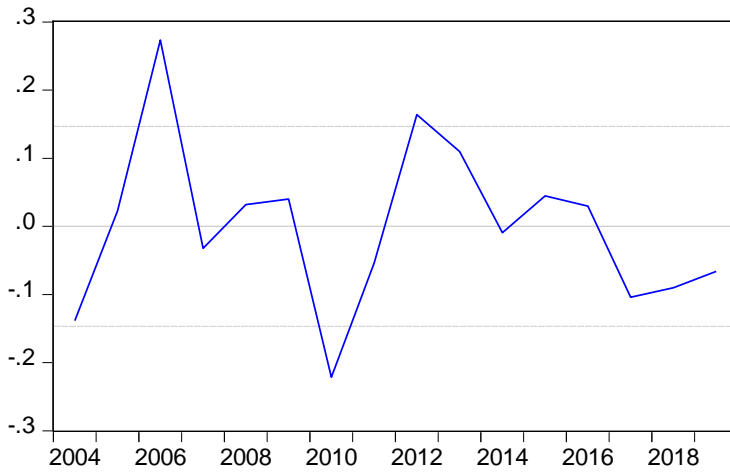
Component	Kurtosis	Chi-sq	df	Prob.
1	5.799844	5.226084	1	0.0223
2	3.261248	0.045500	1	0.8311
Joint		5.271585	2	0.0717

Component	Jarque-Bera	df	Prob.
1	8.251153	2	0.0162
2	0.513999	2	0.7734
Joint	8.765151	4	0.0672

LOGY1 Residuals



LOGY2 Residuals



BIOGRAFI PENULIS



Lia Nazliana Nasution, S.E., M.Si Bekerja sebagai Staf pengajar di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Menamatkan S1 Ekstensi Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2008 di Fakultas Ekonomi USU dan S2 Magister Ekonomi Pembangunan tahun 2010 di Sekolah Pascasarjana USU. Penulis saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 Ilmu Ekonomi di USU. Buku yang sudah diterbitkan antara lain berjudul Kajian Inklusi Sosial dan Keuangan di Indonesia, Literasi

Keuangan Masyarakat Studi Kasus Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Studi Kelayakan Bisnis, dan Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur di Indonesia.



Ade Novalina, S.E, M.Si Bekerja sebagai Staf pengajar di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Menamatkan S1 Akuntansi tahun 2000 di Fakultas Ekonomi UMSU dan S2 Magister Ekonomi Pembangunan tahun 2013 di Sekolah Pascasarjana USU. Penulis saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 Ilmu Ekonomi di USU. Buku yang sudah diterbitkan antara lain berjudul Statistik Ekonomi Konsep dan Aplikasi, Ekonometrika Terapan, Ekonomi Moneter, Kemandirian Ekonomi

Wanita Pesisir dan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.



Ardela, S.E Alumni Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Saat ini bekerja di PT. Dainika sebagai admin.